

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. SAJIAN DATA

Pada bab tiga ini penulis akan mengemukakan sajian data dan pembahasan mengenai strategi kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi oleh pemerintah kecamatan Saptosari kabupaten Gunung Kidul. Peneliti memilih penelitian ini karena menurut peneliti, kecamatan Saptosari memiliki inovasi dalam menurunkan angka pernikahan dini dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Yogyakarta. Inovasi ini pula yang menjadikan kecamatan Saptosari sebagai contoh menurunkan angka pernikahan dini oleh BPPM DIY dalam melakukan kampanye Pendewasaan Usia Pernikahan yang dilaksanakan di 78 kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Saptosari, Gunung Kidul, angka pernikahan dini itu tertinggi di DIY. Kemudian di panggil oleh Bupati bagaimana pak Camat bisa menurunkan angka ini, karena itu kalau didiamkan bangsa ini mau jadi apa kedepan. Kemudian dari Saptosari ini pak Camat ya berputar otak, akhirnya menemukan bahwa kita ini semua lini SKPD maupun lembaga-lembaga yang ada di bawah ini bekerjasama, berjejaring, berkontribusi saling mempunyai komitmen untuk menurunkan angka itu. Nah di Saptosari diolah terus dengan desa-desanya. Kepala desa dipanggil kemudian lembaga-lembaga yang di tingkat desa dikumpulkan, pemerhati-pemerhati, guru sekolah, semuanya dikumpulkan. Itu disampaikan, ini lho keprihatinan Saptosari seperti ini, bagaimana kita bisa menurunkan. Akhirnya di tahun 2016 Saptosari bisa menurunkan sampai nol. Ini kita pelajari, kok bisa seperti itu, bisa sampai nol itu seperti apa. Kami kesana mempelajari, kami ketemu langsung dengan aparat disana, belajar. Nah rupanya itu yang terbaik, kita harus berjejaring seperti itu. (hasil wawancara drg.Retno Nurmawati M.Kes Kepala Bidang Keluarga Berencana BPPM DIY pada 02 Agustus 2017)

Berdasarkan keberhasilan kecamatan Saptosari dalam menurunkan hingga meniadakan kasus pernikahan dini tersebut, peneliti ingin meneliti strategi apa saja yang dilakukan pemerintah kecamatan Saptosari dalam mengkampanyekan dan mendeklarasikan anti menikah dini.

Strategi merupakan suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik pelaksanaannya. Strategi kampanye dilaksanakan berdasarkan analisis masalah serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam strategi kampanye terdapat 3 tahapan yaitu perencanaan kampanye, pelaksanaan kampanye, dan evaluasi kampanye.

1. Perencanaan Strategi Kampanye

Perencanaan kampanye merupakan tahap awal dalam proses strategi kampanye. Fungsi utama perencanaan dalam kampanye adalah untuk membentuk arah tindakan yang akan dilakukan nantinya agar teratur dan terarah. Dalam tahap perencanaan kampanye, terdapat beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah kecamatan Saptosari sebelum melaksanakan kampanye.

a. Langkah pertama : Analisis Masalah

Langkah awal dari perencanaan strategi kampanye adalah dengan melakukan analisis masalah. Analisis masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan atau isu apakah yang sedang terjadi. Pemerintah

Kecamatan Saptosari beserta tim yang terdiri dari KUA, Puskesmas, Polsek, dan instansi dinas lainnya, melakukan analisis masalah melalui forum diskusi para pejabat dinas instansi pemerintahan melalui pengajian rutin yang dilaksanakan setiap bulannya. Dalam pengajian rutin tersebut, mereka sering membahas permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar. Pada tahun 2014, pengajian rutin tersebut melakukan diskusi mengenai masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, perceraian, gizi buruk, serta pendidikan rendah. Dalam diskusi tersebut, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat disimpulkan karena masih banyak terjadinya pernikahan dini.

Dulu kan begini, saya disini kan masuk 2013 akhir ya sekitar bulan September. Terus kemudian kan kondisinya kan banyak hal yang istilahnya terbelaknglah disini. Jadi kemiskinan sangat tinggi, waktu itu dari 9.500 KK itu yang miskin 5709 KK. Nah ini kan terus dampak turunannya kan banyak sekali, karena kemiskinan itu salah satunya ya gizi buruk banyak, kematian bayi banyak, terus pendidikan rendah dan sebagainya. Lha trus kemudian kita punya forum pengajian antar karyawan ya, itu semua dinas instansi, karyawan, kades, kemudian bareng-bareng kita diskusi kita cari tahu penyebabnya. Ternyata salah satu hal yang baik sebagai penyebab maupun akibat kemiskinan itu karena tingginya angka pernikahan anak. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Pernyataan Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si selaku Camat Saptosari mengenai diskusi dalam menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat juga dikuatkan oleh pernyataan mantan kepala Puskesmas sebelumnya yaitu Sugimin, SKM.,MM bahwa diskusi dilakukan tidak hanya dalam

forum pengajian saja, melainkan mereka juga seringkali melakukan diskusi atau percakapan biasa saat bertemu. Dari percakapan-percakapan tersebut, masing masing pemimpin instansi ini yaitu Kepala KUA, Kepala Puskesmas, dan Camat mengutarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Diketahui banyaknya permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan masyarakat diantaranya masalah gizi buruk, angka bayi meninggal cukup tinggi, angka anemia tinggi, serta tingginya angka BBLR (berat badan bayi lahir rendah). Hal ini ternyata dikarenakan ibu yang melahirkan berusia kurang dari 19 tahun, yang artinya sang ibu melakukan pernikahan dini.

Waktu itu kan ada tujuan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan di Puskesmas Saptosari. Kalo dari kesehatan, kemudian dari KUA, dari kecamatan, itu kan punya masalah sendiri-sendiri. Nah masalah itu, waktu rembukan-rembukan itu, kan diutarakan. Kalau di kesehatan waktu itu dari data kita, waktu itu Saptosari angka bayi meninggal cukup tinggi, gizi buruk juga cukup tinggi, BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) juga tinggi, angka anemianya juga cukup tinggi, bah waktu itu kita analisa. Setelah kita analisa dengan programmer yang di KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), nah itu ternyata dari semua alurnya itu, faktor yang berpengaruh besar itu ternyata karena ibu yang melahirkan itu umurnya kurang dari 19 tahun, jadi artinya itu adanya pernikahan dini. Faktornya banyak ya, tapi yang berpengaruh itu angka pernikahan dininya dibawah 19 tahun itu ternyata tinggi. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Selain permasalahan kesehatan yang diutarakan oleh Kepala Puskesmas, permasalahan mengenai sosial masyarakat lainnya juga

dibicarakan. Dalam percakapan tersebut diutarakan mengenai masalah kemiskinan atau ekonomi masyarakat rendah hingga masalah di lingkungan KUA yaitu banyaknya dispensasi pernikahan serta tingginya angka perceraian. Melalui diskusi tersebut mereka menemukan sumber utama masalah-masalah tersebut yaitu akibat pernikahan dini. Dispensasi pernikahan yang diberikan KUA, dikarenakan pasangan yang hendak menikah belum cukup usia sesuai dengan undang-undang perkawinan. Banyaknya angka pernikahan dini di Saptosari, mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dikarenakan pasangan tersebut tidak memiliki mata pencaharian yang mencukupi, kemudian munculnya masalah-masalah kesehatan akibat miskin hingga sang ibu yang belum cukup usia untuk memiliki anak.

Kalau dari KUA setelah dilihat, itu ternyata angka perceraianya tinggi. Faktor terbanyaknya itu banyak yang nikah muda, banyak yang dispensasi. Dari segi kecamatan, kemakmuran dan segi ekonominya jadi rendah, ternyata banyak keluarga-keluarga yang memang miskin. Setelah ditelusuri itu ya karena bebannya tinggi, karena banyak dipengaruhi oleh sosial budaya yang menikahkan anak di bawah umur. Jadi kan klop ini, rembukan-rembukan begitu, ternyata oh ini penyebabnya. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Selain dari akibat yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan dini, dalam diskusi pengajian rutin dan diskusi lainnya, pemerintah kecamatan Saptosari juga membahas mengenai penyebab tingginya pernikahan anak

di kecamatan Saptosari. Setelah ditelusuri, ternyata terdapat 2 penyebab tingginya pernikahan dini, yaitu budaya atau kebiasaan masyarakat dan pergaulan bebas. Budaya atau kebiasaan masyarakat Saptosari sendiri menganggap bahwa dengan menikahkan anak mereka, maka beban tanggung jawab keluarga akan berkurang. Selain itu jika menolak lamaran yang telah datang kepada anak perempuan mereka, ditakutkan akan sulit mencari jodoh kembali. Hal ini yang menyebabkan para orang tua segera menikahkan anak mereka meskipun masih dalam usia anak. Kemudian penyebab kedua dari pernikahan dini tidak lain adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas sendiri memang terjadi di semua wilayah seluruh dunia dan hal ini menjadi masalah yang terus diperbincangkan penanganannya. Jika kebudayaan mengacu pada kepercayaan orang tua akan pernikahan dini, maka pergaulan bebas mengacu pada sang anak itu sendiri. Pergaulan bebas sendiri dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah, sehingga menyebabkan sang anak harus menikah.

Kemudian kita bersama-sama dengan dinas tadi itu, mengidentifikasi penyebabnya apa nikah di saptosari itu kok banyak sekali nikah anak. Lha itu ternyata kan ada 2 penyebab, yang satu itu penyebabnya karena budaya atau kebiasaan masyarakat, kalo punya anak cewek itu segera dinikahkan. Ya pertimbangannya mereka ingin segera lepas tanggung jawab, dan segera mengadakan pesta pernikahan itu, dapat sumbangan dan sebagainya. Itu satu, yang kedua itu sama yaitu karena pergaulan bebas itu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Adanya diskusi bersama terkait analisis masalah mengenai pernikahan dini juga disampaikan oleh Handoyo, S.Pd bagian Kesiswaan SMP N 2 Saptosari. Pihak sekolah juga merasakan keprihatinan yang sama mengenai tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Saptosari. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan anak-anak yang menikah terpaksa putus sekolah. Data dari kecamatan menunjukkan rendahnya lulusan SMA/SMK di kecamatan Saptosari dinilai dikarenakan anak yang telah lulus SMP bahkan yang belum lulus SMP memutuskan untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini yang membuat pihak sekolah juga ikut andil dalam mendiskusikan permasalahan pernikahan dini dengan pihak pemerintah kecamatan. Berdasarkan diskusi bersama banyak pihak terkait permasalahan tersebut, maka direncanakanlah kampanye pencegahan pernikahan dini dengan melakukan deklarasi stop pernikahan dini dan pergaulan bebas.

Data yang ada di KUA setelah kita pelajari ternyata tingkat menikah dini di saptosari khususnya lulusan SMP, tidak sampai lulus SMA, jadi mereka melanjutkan SMA tetapi tidak selesai, itu ternyata cukup memprihatinkan. Yang kedua, data yang disampaikan oleh pemerintah kecamatan bahwa rendahnya lulusan SMA SMK ini juga menjadi andil. Ternyata setelah kita pelajari mereka itu tidak sampai lulus SMA SMK karena begitu lulus SMP, sekian bulan kemudian menikah. Belum sampai lulus SMP, menikah. Bahkan ada yang sudah SMA, gak sampai selesai, menikah. SMP baru kelas 9, kelas 8, kelas 7, keluar menikah. Dan setelah dilihat, faktor orang tua itu sangat besar. Jadi maaflah karena di desa kadang-kadang mereka takut kalau punya anak perempuan gak laku, sehingga begitu ada laki-laki yang “kulo nuwun” kemudian menanyakan itu, mereka secepat mungkin itu

oke atau ya begitu. Itulah yang akhirnya menjadi gagasan kita untuk cara apa ya yang mungkin itu. Alhamdulillah pak camat sendiri, Pak Jarot kemudian KUA nya waktu itu Pak Sugimin, kemudian kami waktu itu dipelopori kepala kita Pak Suropto, itu okelah kita membuat apa ya, event apa atau momen apa, kita akhirnya menawarkan sebuah deklarasi stop pernikahan dini dan pergaulan bebas. (hasil wawancara dengan Handoyo, S.Pd bagian Kesiswaan SMPN 2 Saptosari, 14 September 2017)

b. Langkah kedua : Menentukan Tujuan

Langkah berikutnya setelah melakukan analisis masalah adalah menentukan tujuan. Tujuan ditentukan untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dalam mengatasi masalah yang terjadi. Dalam hal ini pihak pemerintah kecamatan Saptosari memiliki tujuan untuk meniadakan lagi terjadinya kasus pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dengan meniadakan lagi pernikahan dini, maka kasus perceraian serta kematian ibu dan bayi diharapkan akan ikut menurun.

Itu kan berangkai, jadi tingginya perceraian salah satu sebabnya itu tingginya nikah dini, karena nikah dini dipastikan 2-3 tahun cerai. Setelah itu angka kematian bayi juga disebabkan nikah dini, karena nikah dini kualitas bayi juga karena bibitnya belum bagus, wadahnya belum bagus, kualitasnya rendah, kematian bayi tinggi. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., MSi pada 04 Januari 2018)

Menurut Camat Saptosari Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si, tujuan pernikahan dini harus ditiadakan lagi dikarenakan pernikahan dini sendiri tidak memiliki nilai positif, baik dalam segi hukum, sosial, pendidikan,

hingga ekonomi. Nilai-nilai tersebut tentunya sangat mempengaruhi masa depan mereka yang melakukan pernikahan dini, serta berpengaruh kepada masyarakat sekitarnya.

Harus sampai habis. Tujuannya harus ditiadakan lagi, karena dari segi apapun nikah anak itu tidak benar. Dari segi hukum juga melanggar, dari segi sosial juga tidak baik, dari segi pendidikan dari segi ekonomi apapun, tidak ada sedikitpun nilai positif nikah anak itu. Makanya harus betul-betul diperangi. Sudut pandang kami tidak hanya masalah sosial, ini ada unsur hukum, jadi memang harus diperangi. Sekarang anak dia masih bersikeras ingin sekolah, tapi dia sama orang tuanya diharuskan keluar, kan pelanggaran hak-hak anak juga. Kewajiban orang tua kan sampai umur 18 itu kewajiban penuh. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 20 November 2017)

Dari segi hukum telah dijelaskan melalui undang-undang perkawinan dimana batas usia minimal perempuan adalah 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun. Kemudian jika kasus ini dilihat dari sisi undang-undang perlindungan anak, bagi anak yang masih berusia dibawah 18 tahun memiliki hak-hak untuk dilindungi begitu pula dengan memperoleh pendidikan. Anak berhak mendapat pendidikan hingga berusia 18 tahun, jika dipaksa menikah maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Kalau dari segi hukum kan sudah jelas ada undang-undang perkawinan. Boleh nikah itu kalau putri 16 tahun kalau putra 19 tahun. Kedua dari undang-undang perlindungan anak, pengertian anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun. Berarti nikah dini itu kan masih anak. Anak itu punya hak-hak yang dilindungi oleh konvensi dunia maupun undang-undang. Jadi termasuk pendidikan itu hak anak. Orang tua itu harus memberikan pendidikan kepada anak sampai berusia 18 tahun, kalau dipaksa

menikah itu kan melanggar hukum. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

Selain dari segi hukum, pernikahan dini juga merugikan dari segi ekonomi. Anak yang menikah tanpa adanya kesiapan dalam ekonomi, maka hanya akan menambah panjang daftar keluarga miskin. Hal ini dikarenakan belum siapnya mereka secara ekonomi mandiri. Sang anak yang minim pendidikan serta ketrampilan, akan sulit mandiri dan memiliki mata pencaharian. Namun dikarenakan telah menikah, kartu keluarga (KK) yang sebelumnya masih mengikuti orang tua, tentunya telah berganti dengan KK yang baru. Dikarenakan tidak memiliki ketahanan dari segi ekonomi, maka keluarga baru tersebut akan ditetapkan sebagai KK miskin.

Dari segi ekonomi dapat dipastikan nikah dini itu langsung jadi KK miskin, pasti. Karena apa, belum punya mata pencaharian. Padahal begitu menikah kan KK nya harus pisah dan harus mandiri. Kalau masih anak dari segi pendidikan dan ketrampilan belum cukup, jadi tidak mungkin bisa mandiri. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

Begitu pula jika diperhatikan dari segi sosial. Bapak Camat Saptosari Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si, juga menjelaskan bahwa rata-rata yang menikah dini 2 sampai 3 tahun berikutnya akan bercerai. Setelah bercerai, kehidupan keduanya akan hancur. Hal ini dikarenakan setelah bercerai maka mereka masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang bebas.

Perempuan yang merasa telah janda dan tidak memiliki uang, maka akan mencari pekerjaan di lingkungan yang tidak baik, seperti karaoke, salon *plus-plus*, dan sebagainya. Menikah dini secara tidak langsung justru menambah daftar masalah baru.

Dari segi sosial, dari pengalaman yang tadi itu kan rata-rata 2-3 tahun cerai. Itu terbukti. Setelah cerai, cowok atau ceweknya duaduanya hancur. Cowok trus nakal seperti itu pergaulannya, terus cewek begitu karna dia sudah tidak suci lagi ya istilahnya, sudah janda, dia main trus tidak punya uang, ada menggoda begitu ya jadinya, hampir semua. Kalau saya sering wawancara ke karaoke, salon plus, itu anak-anak 18 tahun 19 tahun sudah janda semua. Dia nikah umur 15 tahun, hampir semua. Nggak ada yang masih gadi jadi LC, gak ada. Jadi istilahnya nikah dini itu mensuplai masalah di kota. Kita punya kampung yang nyuplai di Marina Salon itu, kita punya padukuhan yang nyuplai, ada. Makanya ini kan jadi hal yang luar biasa karena itu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

c. Langkah ketiga : Menentukan Sasaran (*Stakeholder*)

Langkah selanjutnya setelah menentukan tujuan meniadakan lagi pernikahan dini, pemerintah kecamatan Saptosari menentukan sasaran atau *stakeholder* yang akan dituju. Dalam proses ini, pemerintah kecamatan Saptosari menentukan beberapa tahap *stakeholder* untuk pelaksanaan kampanye. Sasaran dari kampanye ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dimulai para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat terlebih dahulu, kemudian diturunkan kepada masyarakat melalui para tokoh-tokoh tersebut. Hal ini akan dirasa lebih efektif dibandingkan langsung terjun ke masyarakat. Jika pemerintah langsung

menyasar ke masyarakat, maka akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruhnya secara langsung. Namun jika dilakukan secara bertahap dari pihak atas yaitu pemimpin dan tokoh masyarakat, kemudian turun ke bawah hingga lapisan masyarakat maka dirasa akan lebih efektif.

Masyarakat itu kan ribuan. Kami kan juga tidak mampu ke masyarakat terus. Kami juga gak mungkin menyentuh masyarakat langsung dengan jumlah sekian puluh ribu, nah kami kan tetap menyentuh yang tokoh-tokohnya dulu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

Pada tahap pertama, pemerintah kecamatan Saptosari akan mengajak *stakeholder* tingkat tertinggi di kabupaten serta kecamatan untuk bersama-sama mendeklarasikan diri memerangi pernikahan dini dan perceraian. Dalam deklarasi tahap pertama tersebut, akan dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul, dinas-dinas terkait tingkat kabupaten seperti dinas sosial, dinas kesehatan, Muspida (Polres, Dandim), serta diikuti pula oleh dinas dan tokoh-tokoh tingkat kecamatan yaitu Muspika, KUA, Puskesmas, Kepala Desa, dan sebagainya.

Nah terutama ini harus kita awali dari stakeholder tingkat tertinggi di kecamatan, yaitu dari antara saya, koramil, polsek, KUA, dan semuanya. Ini kita rancang kemudian kita undang Bupati, kita undang Muspida, semua pejabat kabupaten disini, di tempat ini. Terus dengan dinas-dinas yang terkait di kabupaten kita undang semua, waktu itu ada dinas kesehatan, dinas sosial, dan sebagainya disini. Kemudian ya kita mendeklarasikan diri bahwa mulai saat ini, kita harus perangi nikah dini dan perceraian itu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 20 November 2017)

Setelah menentukan deklarasi tahap pertama dengan para petinggi tingkat kecamatan, deklarasi akan dilanjutkan di tingkat desa dengan *stakeholder* yang terdiri dari pejabat tingkat desa dan masyarakat, yaitu dengan kepala desa, karang taruna, ibu-ibu PKK, RT, RW, dan sebagainya.

Sasarannya tokoh-tokoh dulu, kepala dinas dan stakeholder lainnya tingkat kecamatan, kemudian kita kita breakdown deklarasi di tingkat desa, itu dengan kepala desa dan tokoh-tokoh stakeholder tingkat desa, ada karang taruna, PKK, takmir masjid, RT, RT, dan sebagainya. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Selain menentukan stakeholder tingkat kabupaten dan kecamatan sendiri, pemerintah Saptosari juga menjadikan siswa seluruh sekolah menengah pertama (SMP) dan SMK di Saptosari sebagai *stakeholder* yang dituju. Jika tahap sebelumnya menyebarkan informasi secara meluas kepada masyarakat untuk menanggulangi budaya pernikahan dini, maka untuk di tingkat siswa SMP dan SMK ini untuk menanggulangi pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Pemilihan sasaran kampanye kepada siswa SMP dikarenakan pada kasus-kasus sebelumnya, banyak yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, namun memutuskan untuk menikah. Batasan usia 16 dan 19 tahun juga menjadi acuan mengapa kampanye diadakan untuk tingkat SMP dan SMK.

Itu kan baru yang subbab pertama ya dari kebiasaaan, nah itu langkah kita untuk yang kebiasaan budaya itu sampai ke RT itu. Penyebab kedua itu kan pergaulan bebas, pergaulan bebas itu kan

lebih ke anak, bukan orang tua. Kita deklarasi di sekolah-sekolah. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

d. Langkah keempat : Menentukan Pesan

Langkah keempat yang dilakukan adalah menentukan pesan yang akan disampaikan dalam kampanye kepada *stakeholder* atau sasaran. Penentuan pesan merupakan tahap yang sangat penting dikarenakan pesan tersebutlah yang nantinya akan menjadi disampaikan untuk merealisasikan tujuan dari kampanye, yaitu merubah pandangan masyarakat terkait pernikahan dini. Dalam langkah ini, pemerintah kecamatan Saptosari menentukan beberapa pesan yang akan disampaikan kepada *stakeholder*, melalui diskusi dengan berbagai pihak yaitu Puskesmas, Polsek, dan KUA.

Hampir berbulan-bulan itu kita analisa dulu. Kita bisa menentukan penyebab dari hasil budaya dan pergaulan bebas itu kan pengamatan dulu, berbulan-bulan oleh kami terutama saya pribadi. Terus kemudian akibat dan sebagainya dari sisi kesehatan, kita diskusi dengan kepala puskesmas. Oh ini pak nanti jadi gizi buruk, bayinya nanti tidak berkualitas, rahimnya juga belum siap, nanti kadang hamil yang beresiko tinggi dan sebagainya, itu kan dari puskesmas. Dari segi hukum ya dari polsek. Akhirnya disimpulkan strateginya gimana, oh ini harus pake deklarasi itu juga dari pengamatan. Setelah itu ada kesimpulan bersama apa yang harus kita tekankan dari sisi hukum, dari sisi kesehatan, dari sisi agama, sosial, itu sudah sepakat. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Melalui proses panjang diskusi dengan beberapa pihak terkait, maka ditentukan beberapa pesan yang nantinya akan disampaikan kepada

masyarakat. Beberapa komponen pesan inti dibentuk oleh pihak kecamatan agar dapat disampaikan secara massif dan diturunkan terus menerus kepada seluruh masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian turun ke tingkat desa, padukuhan, hingga tingkat RT. Adapun isi pesannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pernikahan usia dini mengakibatkan semua cita-cita anak dan orang tua hilang.
- 2) Pernikahan usia dini akan memunculkan keluarga / KK miskin baru.
- 3) Pernikahan usia dini berakibat ibu dan bayi tidak sehat;
- 4) Pernikahan usia dini memunculkan kualitas bayi rendah
- 5) Sebagian besar Pernikahan usia dini berakhir dengan perceraian setelah 2-3 tahun menikah, anak ditiptkan pada kakek/neneknya.

Sumber : Dokumen Makalah Pernikahan Usia Dini milik pemerintah
Kecamatan Saptosari

Pemilihan kelima pesan tersebut merupakan inti dari keseluruhan kampanye yang ingin disampaikan kepada seluruh warga. Mulai dari pesan pertama yang berisi bahwa pernikahan dini mengakibatkan semua cita-cita anak dan orang tua hilang. Pesan ini bermakna bahwa setiap anak dan orang tua tentunya memiliki cita-cita untuk kehidupan yang lebih baik. Namun dikarenakan melakukan pernikahan dini, tentunya sang anak

tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterampilan serta wawasan yang dimiliki untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik tentunya sangat minim mengingat jenjang pendidikan yang masih rendah, sehingga pada akhirnya nanti tidak dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang bagus.

Semua orang pada dasarnya kan punya cita-cita mereka, mau meraih kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Sebelum tercapai dia sudah nikah duluan kan habis to. Habis itu cita-citanya kan sudah mengurusinya. Apalagi kalau sebelum menikah sudah hamil duluan. Bagaimana dia mau mencapai cita-cita kalau sekolahnya saja tidak bisa lanjut. Cita-cita tidak akan tercapai. Mungkin kalau mereka tidak nikah duluan, dari SMP misalnya bisa lanjut SMK, lanjut perguruan tinggi, minimal sampai D3 lah, kan itu sudah masuk bagus untuk bekerja. Kalau mereka bisa lulus D3 bisa bekerja, cita-cita mereka kan tercapai nih. Dia kehidupannya waktu sudah nikah sebelum nikah secara ekonomi, sudah kuat. Kalau secara ekonomi kuat kan hidupnya sejahtera. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Pada pesan kedua dijelaskan bahwa pernikahan dini memunculkan KK miskin yang baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Jarot selaku camat Saptosari, anak yang menikah dini tentunya belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ditambah pula dengan pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak atau bisa dikatakan cukup. Hal ini yang mengakibatkan munculnya KK miskin yang baru.

Kemudian pesan ketiga dan keempat berisikan tentang pesan kesehatan yaitu pernikahan dini mengakibatkan ibu dan bayi tidak sehat serta pernikahan dini memunculkan kualitas bayi rendah. Hal ini dikarenakan keadaan keluarga yang tidak mencukupi secara ekonomi. Keluarga yang hidup dengan ekonomi rendah, tentunya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, apalagi untuk ibu hamil maupun balita yang memang membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak. Kenyataan ini membuat sang ibu muda dan bayi yang baru dilahirkan tidak sehat karena asupan gizi yang tidak mencukupi. Selain itu, bayi yang dilahirkan juga memiliki berat badan yang rendah yaitu dibawah 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah tentunya memiliki kualitas yang rendah pula dikarenakan perkembangan otak anak tidak maksimal sehingga mengakibatkan IQ nya juga rendah.

Kalo dia di bawah umur, resiko kehamilan, melahirkan, tidak selamat bayi dan ibunya kan sangat tinggi, karena ada pendarahan, BBLR, kalau bayi sudah lahir rendah itu kehidupannya sulit. Kenyatannya bayi yang BBLR itu IQ nya tinggi gak bisa, pertumbuhannya juga terhambat. Karena perkembangan otaknya tidak maksimal, beda dengan bayi normal. Ibunya tidak sehat, anaknya juga tidak sehat. Seperti kalo anemia, ibunya kurus kurang gizi, itu ya karena itu. Untuk makan bayinya gak ada, ibunya juga butuh asumsi lebih, tapi tidak punya uang. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Pesan berikutnya yang akan disampaikan kepada masyarakat yaitu berkaitan dengan kondisi sosial dimasyarakat yaitu pernikahan dini juga

meningkatkan angka perceraian. Hal ini dikarenakan anak yang menikah dini tidak siap dalam menghadapi berbagai tanggung jawab dan persoalan rumah tangga hingga pada akhirnya banyak yang berakhir pada perceraian. Selain mengakibatkan pernikahan berakhir, pernikahan dini juga dapat berdampak buruk pada anak-anak. Hal ini dikarenakan sang Anak yang masih kecil kemudian dititipkan kepada nenek dan kakeknya, sedangkan orang tua biasanya akan sibuk bekerja bahkan keluar daerahnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tentunya dapat berdampak psikologis pada sang anak, kemudian masalah berikutnya yang dapat muncul adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini tentunya dapat berdampak kembali pada terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Oleh karena itu masalah pernikahan dini ini justru menimbulkan berbagai masalah baru yang pada akhirnya akan berputar kepada terjadinya pernikahan dini kembali.

Sosial disana itu nikah, punya anak, orang tuanya pergi kerja, anaknya dititipkan ke simbahnya. Itu berdampak pada perkembangan psikologis anak-anaknya. Makanya kenapa polsek punya kepentingan, kenakalan remaja kan dari situ, keamanan kan dari situ. Anak yang tidak terurus, terlantar kan disitu faktornya. Makanya kita satu komitmen. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

e. Langkah kelima : Taktik

Langkah kelima yang dilakukan dalam perencanaan adalah menentukan taktik. Penentuan taktik dilakukan untuk mengetahui bahwa audiens mendengarkan pesan kampanye tersebut dengan baik. Dalam menentukan taktik ini, tim kampanye akan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang ada di kecamatan Saptosari yaitu seluruh instansi dinas, kepala sekolah, kepala desa, lurah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat agar mereka mengetahui permasalahan yang terjadi. Dengan mensosialisasikan terlebih dahulu, maka masyarakat tidak akan terkejut dengan adanya kampanye dan deklarasi yang akan dilakukan. Melalui sosialisasi awal, perlahan-lahan kesadaran akan penyelesaian masalah pernikahan dini sudah ada di benak masyarakat.

Dalam perjalannya kita juga dibantu Rifka Annisa untuk pertemuan-pertemuannya itu. Nah akhirnya waktu itu kita susun strategi, jadi strategi untuk sampai ke deklarasi itu kan perlu istilahnya sosialisai dulu. Jadi waktu itu kegiatannya banyak ya, kita mulai dari semua lintas sektor, semua komponen yang ada di kecamatan, kita libatkan semua, kita ajak bareng berpikir bersama. Nah itu mulai dari sekolah SMP, SMA, semua kepala sekolah, kemudian desa semua lurah kita ajak ngomong, kemudian semua tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kita ajak ngomong, sampai itu dari kepolisian/Polsek, Koramil diajak ngomong, itu strateginya. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Gambar 3.1
MoU dan Deklarasi
Pencegahan Pernikahan Dini, Perceraian, dan Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Bayi di Kecamatan Saptosari



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Saptosari 2015

Selain taktik berupa sosialisasi yang dilakukan sebelum kampanye, pihak kecamatan Saptosari juga menentukan strategi untuk mencegah terjadinya lagi pernikahan dini saat atau pasca kampanye dilakukan, yaitu dengan kesepakatan bersama para pemimpin dinas dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, seperti Lurah, Kepala Desa, hingga KUA. Kesepakatan tersebut yaitu akan mempersulit proses menuju pernikahan diantaranya pengurusan perijinan dan sebagainya. Disamping itu, Camat Saptosari juga akan melakukan taktik lain jika masih terdapat masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dini. Taktik tersebut akan dilakukan

secara kerja sama dengan pihak Polsek, KUA, dan Puskesmas Saptosari, dimana perempuan dan laki-laki yang akan menikah dini, didatangkan ke kantor kecamatan bersama para orang tua untuk menghadap Camat Saptosari beserta Kapolsek.

Jadi itu kan orang mau nikah itu kan cukup ke desa dan KUA, usianya kurang KUA juga akan memberikan pengantar. Yang perlu ketemu saya itu kan kalau nikah tergesa-gesa, kurang dari 10 hari baru ke saya. Kalau kurang umur, mau nikah itu saya gak ada hubungannya. Tapi karena kesadaran saja, komitmen tadi, jadi seperti itu. Pak kepala KUA gak berani dia langsung ke pengadilan agama, karena sudah ada komitmen tadi. Kita komitmen dengan puskesmas ada perintah saya langsung sebelum nikah harus di cek hamil atau tidak. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

Gambar 3.2

Peserta MoU dan Deklarasi



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Saptosari 2015

f. Langkah keenam : Messenger (Pemesan)

Langkah keenam yang dilakukan dalam perencanaan suatu kampanye adalah menentukan pihak penyampai pesan atau *Messenger*. Pihak penyampai pesan sendiri berkaitan dengan pesan apa yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan kampanye. Pemerintah kecamatan Saptosari sendiri menentukan kerjasama yang akan dilakukan selama pelaksanaan kampanye, yaitu dengan melibatkan Polsek, KUA, Puskesmas Saptosari, Polsek, dan LSM Rifka Annisa sebagai pihak penyampai pesan yang akan menyampaikan pesan dalam setiap pelaksanaan kampanye. Pihak penyampai pesan nantinya akan menyampaikan pesan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Camat Saptosari pada awalnya akan menyampaikan pesan beberapa segi negatif yang muncul jika terjadinya pernikahan dini, meliputi segi ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, dan kesehatan.

Kan ada sendiri-sendiri bagiannya, kalo saya kan secara umum ya, dampak buruk secara sosial, masalah ekonomi, masalah nanti akan bercerai, kemudian menjadi masalah sosial baru, itu kan saya. Saya jelaskan ke orang tua kan kalau niatnya melepas tanggung jawab itu terbalik, karena setelah nikah itu biasanya nanti dua tiga tahun cerai, akhirnya cucunya kan dititipkan ke mbahnya, niatnya mereka menikahkan segera lepas tanggung jawab ternyata malah menambah tanggung jawab. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

Setelah pandangan secara umum terkait akibat pernikahan dini disampaikan oleh pak Camat, pesan tersebut akan disampaikan dengan

lebih detail atau mendalam oleh pihak-pihak yang menguasai pesan, seperti dari segi hukum akan disampaikan oleh Kapolsek, dari segi kesehatan akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas, dari segi pernikahan akan disampaikan oleh Kepala KUA.

Kalo polsek nanti menjelaskan undang-undang perlindungan anak, nah itu kan usia 18 keatas, kalo kurang dari itu kan masih tanggung jawab orang tua. Kalo ada berhubungan badan sebelum usia itu pidana, bukan delik aduan, jadi mereka takut. Sekarang anak SMP dihamili anak SMA, kalau orang tua gak terima, anak SMA itu dituntut, kena. Bisa sampai 15 tahun hukuman, dan sebagainya, hancur masa depannya. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

g. Langkah ketujuh : Sumber Daya

Langkah ketujuh yang dilakukan adalah menentukan seberapa banyak sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kampanye. Sumber daya sendiri dibagi ke dalam tiga jenis yaitu sumber daya manusia (SDM), biaya operasional (alokasi dana), serta perlengkapan transportasi atau pendukung teknis untuk tim kampanye. Pada tahap ini penentuan sumber daya dilakukan dengan membentuk panitia pelaksanaan kampanye. Kepanitiaan awal yang dibentuk merupakan panitia yang berasal dari seksi kesejahteraan sosial di pemerintah kecamatan Saptosari.

Jadi kecamatan semua kantor itu kan tugas itu terbagi habis. Terbagi habis di seksi-seksi. Otomatis karena nikah dini itu masalah sosial, itu ya pak kasi kesos (kepala seksi kesejahteraan sosial) beserta staf-stafnya. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 04 Januari 2018)

Selain dari pemerintah kecamatan, panitia sumber daya juga berasal dari KUA, Polsek, Puskesmas serta LSM Rifka Annisa. LSM Rifka Annisa sendiri dilibatkan melalui Kepala KUA Saptosari dikarenakan mempunyai program dan tujuan yang sama berkaitan dengan advokasi masyarakat yaitu pencegahan pernikahan dini, sehingga panitia pelaksanaan kampanye dibantu oleh LSM Rifka Annisa.

Setelah itu kita sepakat, walaupun kita tidak punya dana nih. Nah oleh pak KUA itu kita disambungkan dengan Rifka Annisa. Nah Rifka Annisa ini yang istilahnya kita ajak ngomong nyambung, karena mereka juga punya program yang tujuannya sama, sehingga waktu itu kita dibantu oleh Rifka Annisa. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Selain sumber daya manusia, alokasi dana juga tentunya sangat dibutuhkan saat melaksanakan kampanye. Namun dalam pelaksanaan kampanye ini, pemerintah kecamatan saptosari tidak mempunyai alokasi dana khusus untuk kampanye. Dana diperoleh dari iuran sukarela saat pengajian rutin bulanan di kecamatan serta dibantu oleh LSM Rifka Annisa.

Memang tidak ada anggaran itu sama sekali tidak ada. Dari kabupaten juga gak ada. Karena niat kita satu tujuan untuk masyarakat jadi ikhlas untuk berbuat sesuatu, tidak ada yang menggerakkan, ya kita sendiri yang menggerakkan kemauan itu. Nah ini juga diikuti oleh seluruh teman-teman. Kalo puskesmas ya seluruh petugas puskesmas kita ajak untuk itu, KUA juga seluruh stafnya, Kecamatan juga begitu. Semua mendorong tanpa melihat anggaran, dan anggaran itu dimana tidak

dipermasalahan. Dan itu untuk mendapatkan apa-apa kami tidak berpikir kesitu. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

h. Langkah kedelapan : Assessment / Perencanaan Evaluasi

Langkah kedelapan adalah *assessment* atau perencanaan evaluasi, yaitu menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari seluruh proses aktivitas kampanye. Dalam tahap ini, pemerintah kecamatan Saptosari tidak melakukan proses perencanaan pemantauan evaluasi secara tertulis. Namun di dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah kecamatan hanya akan melakukan proses evaluasi rutin mengenai rangkaian aktivitas kampanye melalui forum diskusi pengajian bulanan sebagaimana dari forum tersebutlah analisis masalah ditemukan. Dalam forum pengajian tersebut nantinya akan dibahas bersama mengenai perkembangan kampanye yang dilakukan. Selain itu, pak Camat juga akan melakukan evaluasi dengan melihat data pernikahan dini yang ada di KUA kecamatan Saptosari, apakah terdapat penurunan jumlah kasus pernikahan dini atau tidak.

2. Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan kampanye merupakan tahapan selanjutnya setelah melakukan langkah-langkah perencanaan kampanye. Dalam melaksanakan program kampanye, diharapkan sesuai dengan rancangan program yang telah dibentuk

sebelumnya. Proses pelaksanaan kampanye harus konsisten dengan mengikuti rancangan yang sudah dibentuk. Namun tidak menutup kemungkinan pula dapat dilakukan penyesuaian berkaitan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan kampanye meliputi : realisasi unsur – unsur pokok kampanye, menguji coba rencana kampanye, pemantauan pelaksanaan, dan pembuatan laporan kemajuan.

a. Realisasi unsur-unsur pokok kampanye

1) Perekrutan dan pelatihan personel kampanye

Kegiatan kampanye merupakan kerja sama tim. Menentukan siapa saja yang akan ikut terlibat dalam melaksanakan kampanye adalah langkah awal dalam tahap pelaksanaan. Dalam melaksanakan rencana program yang telah disusun sebelumnya, pemerintah kecamatan Saptosari tentu memerlukan personel kampanye. Namun dalam menentukan personel kampanye, pemerintah kecamatan Saptosari hanya melakukan pembentukan panitia pelaksana kampanye yaitu dengan melibatkan seluruh seksi kesejahteraan sosial serta pihak KUA, Puskesmas, dan Polsek Saptosari, dan LSM Rifka Annisa. Panitia kampanye yang nantinya juga akan menjadi penyampai pesan kampanye, tidak melalui tahapan pelatihan personel kampanye. Menurut Jarot, panitia kampanye hanya berkumpul untuk rapat

terlebih dahulu, sedangkan untuk bahan materi dan persiapan lainnya dibantu oleh Rifka Annisa.

Oh tidak. Cuma kita mesti rapat dulu. Kalau yang panjang dan banyak bahannya itu dari rifka annisa. Dia kan memang Bergeraknya disitu, jadi dia dari dasar-dasarnya ada. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Tidak diadakannya pelatihan personel kampanye juga dikuatkan oleh pernyataan Sugimin selaku mantan Kepala Puskesmas Saptosari. Tidak diperlukannya pelatihan dikarenakan materi yang nantinya akan disampaikan saat deklarasi maupun sosialisasi ke masyarakat merupakan ranah pekerjaan mereka sehari-hari. Materi yang nanti disampaikan juga merupakan bidang yang telah mereka kuasai, sehingga tidak diperlukan pelatihan personel kampanye.

Enggak. Kita kan sudah tau semua ini masalahnya. Tidak perlu latihan. Jadi kita kalau sosialisasi itu kan membawa masalah kita sendiri. Jadi kita membawa materi sendiri, kesehatan kan membawa materi kesehatan sendiri, KUA membawa materinya sendiri, Kecamatan juga membawa materinya sendiri. Jadi gak ada latihan. Kita kan sudah professional semua, sudah makanan setiap hari itu. Jadi puskesmas itu kan ada banyak tim nya, pemegang kesehatan reproduksi remaja kan Bu Sri Mulyani itu, ada juga tim yang lain, ada bidang pembina wilayah, ada promosi kesehatan, ada petugas gizinya, jadi semua ngomong. Masalah tadi itu kan ada di mereka-mereka ini. Kita kan hanya menyimpulkan tadi, jadi walaupun tidak dilatih mereka sudah tau. Jadi permasalahan kesehatan itu sudah tau. Di KUA itu soal permasalahannya semua petugasnya juga sudah tau. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Meskipun tidak dilaksanakannya pelatihan personel kampanye, menurut Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi menyatakan dalam rapat tim kampanye diadakan pembahasan guna menyamakan persepsi. Hal ini dilakukan agar saat penyampaian materi kampanye, para pelaksana memiliki persepsi yang sama sehingga materi yang disampaikan memiliki sudut pandang yang sama, misalnya saja KUA tidak melulu membahas masalah agama atau surga dan neraka namun lebih mengarah ke sosial masyarakat. Kemudian untuk puskesmas juga mereka diberikan perspektif mengenai gender, resiko korban, penanganan korban, dan lain sebagainya.

Sebenarnya mereka itu punya kapasitas masing-masing, misalnya KUA yang punya program Suscaten, pendidikan pranikah, cuman kalau dulu mungkin isiannya itu mungkin surga neraka, jadi kalau melakukan hubungan di luar nikah itu dosa, gitu-gitu lho. Jadi kontennya yang beda. Nah kita mawarnai kontennya, merubah perspektifnya, cara pandangnya gitu. Misalnya AKI AKB kalau puskesmas dulu mereka kan gak melihat misalnya bagaimana korban KTD atau KDRT butuh penanganan yang beda. Mereka belum paham kolerasinya antara kehamilan remaja dengan AKI AKB. Yaitu perspektif gitu yang kita lakukan. Misalnya puskesmas, mereka ada pendidikan kespro remaja, sebenarnya mereka kan sudah memiliki kemampuan itu, tetapi kita mewarnai dengan perspektif gendernya dan perspektif resiko ke korban, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya begitu (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

2) Mengkonstruksi pesan

Tahap kedua setelah pembentukan personel atau panitia pelaksana kampanye, hal yang harus dilakukan adalah mengkonstruksi atau membangun pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Pesan-pesan inti yang telah dibentuk saat tahap perencanaan, tentunya perlu dikembangkan dengan sedemikian rupa agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Pada tahap pengkonstruksian pesan, panitia menyerahkan kewenangan pengembangan isi pesan yang akan disampaikan kepada para penyampai pesan nantinya, yaitu Camat Saptosari, Polsek, KUA, Puskesmas serta LSM Rifka Annisa. Pihak-pihak tersebut yang akan menyampaikan pesan sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

Pada tahap awal yaitu deklarasi di tingkat kecamatan, pesan yang disampaikan oleh Camat Saptosari yaitu pentingnya kampanye pencegahan pernikahan dini ini dilakukan dengan kerjasama seluruh pihak atau stakeholder. Pada tahapan ini pengkonstruksian pesan masih belum begitu mendalam karena stakeholder masih di lapisan terluar yaitu para pejabat instansi dinas, kepala sekolah, serta kepala desa. Tidak hanya pak Camat saja yang menyampaikan pesan, pihak KUA juga menyampaikan materi kepada masyarakat, diantaranya seputar undang-undang pernikahan serta dampak dari pernikahan siri.

Materinya munakahat. Munakahat itu hukum pernikahan menurut Al-Quran dan Hadits. Itu undang-undang no.174 dan PP no.9 kan kalo menurut undang-undang ini nikah dibolehkan kalo wanita umur 16 tahun penuh, yang pria umur 19 tahun. Kita juga menyampaikan nikah siri kan nikah secara munakahat tadi. Menurut hukum agama dinikahkan, kumpul ini sudah sah, tidak dosa. Namun nanti setelah punya anak, yang pria pergi, tidak ada hukumnya. Pergi ya bablas, maksudnya tidak bisa menuntut si wanita. Tidak ada kekuatan hukumnya setelah nikah, tidak dicatat pemerintah. Sehingga sekarang kan merebak ada indikasi kelompok-kelompok yang ingin melegalkan nikah siri. (hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Saptosari Drs. H. Isnanto, SH.,M.A, pada 20 November 2017)

Kemudian pesan kampanye yang dilaksanakan di tingkat kecamatan tersebut diturunkan kepada pihak sekolah dengan melakukan program yang sama yaitu deklarasi yang berisikan perjanjian siswa untuk tidak melakukan pernikahan dini serta pergaulan bebas. Dalam kampanye ini, konstruksi pesan lebih mendalam, disampaikan oleh para pembicara kampanye atau *messenger* diantaranya Camat, Perwakilan dari Puskesmas dan KUA, serta LSM Rifka Annisa.

Kami menyebut eventnya baguslah. Ya walaupun gak besar tapi cukup hebatlah, karena disitu ada birokrasi, ada tokoh masyarakat, ada orang tua, dari pihak pendidikan juga ada, kemudian si anak itu sendiri. Nah ini biasanya kami kemas dalam sebuah acara, panelis biasanya mba. Tapi kami juga sampaikan ke narasumber baik pak camat begitu, untuk efektif. Jadi langsung ke permasalahan.jadi muqaddimahnya kita minta untuk yang pendek, karena waktu paling kita hanya menggunakan setengah hari, nah jadi nanti dari kecamatan, ini yang diangkat, dari KUA yang diangkat tentang resiko

pernikahan dini misalnya, dari puskesmas tentang kesehatan reproduksinya bagaimana, kemudian dari kepolisian nanti dampak dari nikah dini itu ke kriminalitas, ke perilaku amoral, nanti dari situ. Nah kira-kira mereka kami beri waktu katakanlah 15-20 menit, nah nanti endingnya kita yang di pendidikan menggarisbawahi. Nah setelah itu selesai, kita menyelenggarakan deklarasi ini. Perwakilan siswa nanti menetapkan deklarasi itu, dan saling menandatangani, jadi yang melaksanakan deklarasi siswa itu sendiri, kemudian dari pihak sekolah, orang tua, kemudian pak camat nanti mengetahui. Ternyata itu cukup bermanfaat, peran kita di masyarakat terkait dengan anak didik kita. (hasil wawancara dengan Handoyo, S.Pd bagian Kesiswaan SMPN 2 Saptosari, 14 September 2017)

Gambar 3.3

Dokumen Deklarasi Siswa

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
SMP NEGERI 2 SAPTOSARI
Alamat : Kraibit Sambi Sapanan Gunungkidul DI Yogyakarta KP 55871

**DEKLARASI BERSAMA
STOP PERGAULAN BEBAS DAN PERNIKAHAN DINI**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : EDI GERMANTO
Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL / 2 Mei 2003
Alamat : Kraibit Sambi Sapanan
Sekolah : SMP Negeri 2 Saptosari Gunungkidul

Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas.
2. Tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesopanan.
3. Akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan yang berlaku.
4. Semaksimal menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah dan masyarakat.
5. Akan menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Saptosari, 19 Desember 2015
Yang menyatakan
EDI GERMANTO

Kepala Sekolah : [Signature]
NIP.118070707
S.Pd.
NIP.19608011985011002

Orang Tua / Wali
[Signature]
MARGALAY

Mengetahui :
Camat Saptosari
[Signature]
Jarot Haiditomo, S.I.P., M.Si.
NIP.1960824199031003

Sumber : Dokumen SMP N 2 Saptosari

Dalam kegiatan acara deklarasi yang diselenggarakan di sekolah, tidak hanya para siswa yang diedukasi mengenai bahaya pernikahan

dini, namun juga para orang tua siswa yang juga diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dengan kehadiran orang tua secara langsung atau tatap muka, maka edukasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pada acara ini, pak Camat dan pak Lurah akan memaparkan fakta-fakta di lapangan mengenai contoh beberapa warga yang menikah dini. Para audiens nantinya diberikan penjelasan dampak apa saja yang muncul setelah menikah dini sehingga para orang tua yang hadir dapat lebih memahami resiko pernikahan dini itu sendiri.

Pak lurah juga biasanya masuk mengungkap fakta-fakta lapangan maaf, mungkin keluarga-keluarga yang awalnya nikah dini. Kan pak lurah tau persis. Misal si A nikah sama si B, nikah dini, ternyata kehidupannya jadi seperti ini, anak-anaknya jadi seperti ini. Nah itulah yang akhirnya menjadikan orang tua yang awalnya mungkin tidak tahu jadi tahu ternyata kalau anak saya nikah dini, kalau gak siap semuanya nanti ada dampaknya misalnya perceraian, kemudian ada faktor anak-anaknya mungkin terlantar, karena kan mereka jadi orang tua yang masih sangat muda, belum tau apa-apa. Termasuk dari faktor ekonomi, mereka kan belum siap berfikir secara panjang menanggung kehidupan kan, hanya saling suka. (hasil wawancara dengan Handoyo, S.Pd bagian Kesiswaan SMPN 2 Saptosari, 14 September 2017)

Selain faktor sosiologi dan budaya yaitu dari pihak orang tua yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terdapat pula faktor lain yaitu dari segi teknologi. Jika para orang tua diedukasi mengenai pandangan sosial budaya serta dampak yang muncul ketika sang anak melakukan pernikahan dini, maka para siswa lebih diedukasi mengenai bahaya

pergaulan bebas serta teknologi saat ini. Kemudahan dalam mengakses informasi, juga dapat menimbulkan resiko mudahnya para siswa mengakses konten pornografi. Disini para orang tua juga dihimbau untuk lebih memperhatikan anak mereka dalam mengakses informasi, karena jika faktor sosial budaya dapat teratasi, maka faktor teknologi juga dapat merupakan ancaman terjadinya pernikahan dini kembali karena pergaulan bebas yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi.

Memang yang belum kita sentuh adalah faktor penyebabnya yang diluar sosiologis. Nek sosiologis mungkin kan faktor penyebabnya adalah orang tua nanti takut punya anak perempuan nanti anaknya gak laku, tidak ada yang mau menikahi. Tetapi dari segi yang lain mungkin teknologi kan ada andil juga ini. Karena kita pun mulai khawatir juga, kalau di satu sisi orang tua sudah memahami, itu gak masalah ya, tapi nanti kalau di sisi lain nanti ada teknologi yang menyodorkan perbuatan-perbuatan yang gak baik, kemudian pornografi, akhirnya kan juga memicu sendiri si anak itu, dari dirinya sendiri. Nah ini yang mungkin akan kita cermati juga. Jadi tidak hanya dari segi sosiologis dan budayanya, tapi juga bagaimana teknologi ini bisa juga memberikan andil untuk tidak jadikan anak ke hal-hal seperti itu. Kan ini yang kita sulit juga mba untuk itu. Karena juga sesekali kita razia HP, itu ternyata di dalam HP juga ada gambar-gambar yang semestinya gak mereka lihat. Nah ini kan juga akhirnya menjadi faktor munculnya lagi pernikahan dini, tapi bukan faktor sosial dan kultural, tapi kan sudah faktor teknologi lagi. (hasil wawancara dengan Handoyo, S.Pd bagian Kesiswaan SMPN 2 Saptosari, 14 September 2017)

Selain melakukan deklarasi di tingkat sekolah, kampanye juga dilakukan di lingkungan masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi lebih mendalam oleh LSM Rifka Annisa. Sosialisasi dan edukasi dilakukan

dengan membentuk kelas-kelas diskusi diantaranya kelas remaja, kelas ayah, dan kelas ibu. Untuk kelas remaja dilakukan penguatan konsep diri remaja itu sendiri, memberikan pemahaman untuk mendorong remaja ke arah yang lebih positif. Hal tersebut meliputi bagaimana membangun relasi yang sehat, mengembangkan potensi diri, hingga bayangan tentang rumah tangga, bahwa menikah bukan hanya tentang hal yang menyenangkan saja namun terdapat pula kondisi-kondisi yang harus dihadapi bersama seperti tanggung jawab mencari nafkah, mendidik anak, perencanaan ekonomi, komunikasi, dan sebagainya.

Jadi mereka diberikan pemahaman tentang membangun relasi yang sehat karena mereka kan belum menikah ya, dengan pacar, dengan teman, bagaimana mengembangkan potensi diri, bagaimana mengelola konflik antar teman, kemudian nanti mau menikah itu apa saja yang perlu dipersiapkan, hal-hal yang mungkin terjadi gitu kan. Terus kalian misalnya mau menikah, bayangannya seperti apa, karena yang dibayangkan mesti yang enak-enak aja. Yang penting ada temannya tidur, ada yang ngasih nafkah, gitu-gitu kan. Tapi mereka enggak melihat realitas yang akan dihadapi, realnya itu seperti apa begitu. Jadi ya gitu kita kasih apa namanya, beberapa materi tentang perencanaan keluarga, perencanaan ekonomi, kemudian bagaimana berbagi peran, bagaimana berkomunikasi, kemudian pengasuhan dan segala macam, sehingga mereka punya bayangan dan memang setelah mendapat sesi-sesi itu mereka jadi berfikir ulang untuk kesiapan menikah. (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018).

Gambar 3.4

Diskusi 2 jam di komunitas Sesi Komunikasi Sehat & Dialog Remaja Laki-laki dan Perempuan



Sumber : Arsip Dokumentasi LSM Rifka Annisa

Selain membahas mengenai kesiapan dalam berumah tangga, kelas remaja juga dilakukan dialog antara remaja perempuan dan laki-laki. Disana akan dibahas mengenai pandangan perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal misalnya mengenai bagaimana jika perempuan bekerja, bagaimana jika penghasilan istri lebih besar, sehingga mereka memahami bahwa terdapat perbedaan pandangan perempuan dan laki-laki, sehingga diedukasi pula bagaimana cara bernegosiasi dalam rumah tangga nantinya mengenai perbedaan-perbedaan tersebut.

Jadi kayak semacam mendialogkan, misal : kalo istrimu mau bekerja nanti gimana, seperti itu. Belajar untuk bernegosiasi begitu, karena perempuan harus punya ketrampilan, laki-laki harus mau mendengar, harus mau memahami perempuan ternyata punya kebutuhan, jadi gak hanya saklek besuk udah

nikah pokoke, nah itu kan kalau perempuannya tidak berkenan kan jadi memaksakan, menghambat kreatifitas, pengembangan diri, dan macem-macem gitu. Jadi dialog itu mempraktikan lah begitu, tapi mereka bukan pasangan yang pacaran ya, kita gak nyari yang pacaran, tapi antar teman. Jadi gimana sih pandangan perempuan, pandangan laki-laki. Sampai misalnya : kalau penghasilan istrimu lebih tinggi kira-kira gimana? Jadi pertanyaannya bebas, dari pihak perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Jadi mereka pengen ngerti sih gimana gitu. Disitu kelihatan pandangan laki-laki dan perempuan itu sangat beda, dan keinginannya juga sangat beda. Ketika mereka menikah nanti, ya itu yang akan dihadapi, fakta itu. Jadi gimana mendialogkan perbedaan-perbedaan itu, sehingga mereka nanti bisa saling berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi, untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Karena biasanya ketidakmampuan mengolah konflik itu yang rentan terjadi kekerasan, apalagi kalau salah satunya merasa aku paling berkuasa atau ketimpangan relasi. (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

Tidak hanya kelas remaja saja, namun terdapat pula kelas dewasa yang terdiri dari kelas ayah dan ibu. Pada kelas dewasa ini, edukasi lebih mengarah pada pembahasan problem keluarga., seperti soal berbagi peran, ekonomi, pola pengasuhan, hingga isu kekerasan dalam rumah tangga. Kelas yang diikuti oleh para ayah dan ibu ini juga diedukasi mengenai pentingnya mengedukasi anak tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah pernikahan dini terjadi.

Nah kalau di kelas dewasa itu kita lebih ke apa saja yang dihadapi dalam keluarga, kemudian problem-problem apa, kesulitan apa dalam berkomunikasi, jadi itu yang sering muncul soal berbagi peran, pengasuhan, soal ekonomi, kesehatan

reproduksi, kemudian soal pemilihan isu kekerasan dalam rumah tangga, mengolah amarah dan segala macam. Terus kemudian perencanaan ekonomi, perencanaan keluarga, lalu kita juga edukasi bahwa kalau punya anak remaja perlu diedukasi kesehatan reproduksinya sehingga meminimalisir, mencegah ya kehamilan yang tidak direncanakan, yang itu mestinya menikah dini itu. Kemudian punya anak remaja itu punya kesiapan untuk menikah gitu, jadi kelas dewasa juga diedukasi itu, sehingga mereka juga memahami dan itu bisa menerapkan ke keluarga masing-masing dan juga bisa menjadi role model yang harapannya mereka mengkampanyekan ke masyarakat yang lebih luas. (hasil wawancara Nurawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

Gambar 3.5

Diskusi Kelas Ibu Ds Jetis Saptosari
Membahas Gender Dengan Permainan



Sumber : Arsip Dokumentasi LSM Rifka Annisa

Selain mengedukasi masyarakat, pengadaan kelas remaja serta kelas dewasa juga nantinya diharapkan dapat menjadi role model sehingga dapat mengkampanyekan ke masyarakat yang lebih luas. Selain itu para peserta yang mengikuti kelas diskusi ini nantinya juga akan dilatih untuk menjadi pemateri diskusi kelas berikutnya. Pelatihan diskusi dalam kelas-kelas seperti ini dirasa sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan untuk perubahan yang cukup signifikan di lingkungan masyarakat. Hal ini juga dirasakan oleh Pak Supriyanto Atmojo sebagai salah satu peserta diskusi kelas ayah yang juga merupakan Dukuh Mojosari.

Di kelas bapak ibu ya seputar bagaimana berkomunikasi dalam keluarga, Pola asuh kepada anak, kaitannya dengan adanya kesetaraan gender itu. Jadi istilahnya tidak membedakan gaweanku iki, gaweanmu ini. Ni sekarang bagi saya, ini gak saya tutupi, yang mana yang lebih repot ya itu di cover pekerjaannya. Ya mau nyuci piring, udah gak gengsi. (hasil wawancara dengan Pak Supriyanto Atmojo, Dukuh Mojosari yang mengikuti kelas ayah, pada 8 Maret 2018)

Tidak hanya perubahan pada bapak ibu yang mengikuti kelas diskusi, namun perubahan pada masyarakat juga terlihat signifikan. Hal ini dikarenakan LSM Rifka Annisa memberikan narasumber yang memang mereka butuhkan untuk masyarakat. Menurut Ibu Darwati selaku Dukuh Temanggung, perubahan juga terlihat pada anak-anak yang lebih memilih meneruskan pendidikan dibandingkan menikah.

Jikalau pun mereka tidak mampu meneruskan pendidikan karena masalah biaya, mereka tidak langsung menikah namun lebih memilih bekerja terlebih dahulu

Yang jelas gini mba kalau menurut saya dengan adanya orang Rifka ini, terus terang kalo sebagai dukuh kayak kita-kita ini membantu banget. Jadi kalau yang berbicara itu hanya dukuh, masyarakat ini mikirnya ah opo toh. Tapi kalau ada yang menggandeng kan tetep rasanya lebih, karena apa Rifka mengambil narasumber yang memang sesuai dibutuhkan masyarakat kita. Harapan kita jangan sampailah pernikahan dini muncul kembali. Anak-anak itu kalau yang tidak bisa meneruskan pendidikan itu karena ekonomi keluarga mereka tidak bisa. Tapi anak-anak sekarang cenderung memilih untuk bekerja, walaupun hanya bekerja apa di sekitar sini mungkin, yang merantau juga ada, tapi kalau keinginan untuk langsung nikah itu jarang kok mbak sekarang. Mungkin dari sekolah mereka juga sudah ada informasi dari tenaga pendidik. (hasil wawancara dengan Ibu Darwati, Dukuh Temanggung yang mengikuti kelas ibu, pada 8 Maret 2018)

3) Menyeleksi penyampai pesan kampanye

Pada umumnya faktor pokok yang harus diperhatikan dalam menyeleksi pelaku kampanye adalah kesesuaian tokoh tersebut dengan objek kampanye, media yang digunakan, dan kredibilitas yang bersangkutan di mata publik. Objek kampanye umumnya dijadikan dasar pertimbangan pertama dalam menetapkan penyampai pesan kampanye. Dalam penyeleksian penyampai pesan ini, otoritas penyampai pesan dibebankan langsung oleh Camat kepada para tim kampanye yang meliputi Polsek, KUA, dan Puskesmas. Pihak

tersebut yang nantinya akan menunjuk siapa saja yang menjadi penyampai pesan dalam setiap pelaksanaan kampanye deklarasi.

Enggak. Jadi itu sudah kita bebaskan ke masing-masing dinas. Otomatis kan dinas tidak harus kepaanya, tapi itu intern dinas. Nanti jenengan tanya ke kepalanya, tapi ini sudah ganti semua, kepala polsek baru, puskesmas baru, KUA baru, kan jadi istilahnya dari pas kita pelaksanaannya itu sudah ganti semua, tinggal saya. Jadi kadang kalau kepala puskesmasnya gak bisa, dia kan sudah menunjuk penggantinya, jadi mereka sudah dibekali. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

4) Menyeleksi saluran kampanye

Menyeleksi media mana yang akan dijadikan saluran kampanye harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Beberapa faktor pokok yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media kampanye diantaranya : jangkauan media, tipe dan ukuran besarnya khalayak, biaya, waktu, dan tujuan serta objek kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye ini, media yang digunakan adalah komunikasi tatap muka melalui sosialisasi dari para penyampai pesan yaitu Camat, Puskesmas, KUA, Polsek dan LSM Rifka Annisa. Media komunikasi melalui pihak penyampai pesan dipilih agar dapat memperoleh hasil yang maksimal karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain itu dengan memanfaatkan personil yang memang bekerja sesuai bidangnya masing-masing, maka pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipercaya oleh

masyarakat karena sudah mengenal mereka sebelumnya. Melalui bentuk kampanye seperti ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang sangat minim mengingat kampanye ini juga merupakan pengabdian kepada masyarakat.

Kita kan sudah paham betul ya jadi kalau orang-orang disini kan sudah paham betul bahasa disini, sudah paham dunia sosial disini, jadi komunikasi dengan mereka tidak masalah, tidak sulit. hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Selain menyampaikan pesan kampanye melalui tatap muka, pemilihan media massa juga dilakukan. Namun yang dipilih adalah slogan dan poster karena sifat keterjangkauan serta dana yang terbatas. Slogan-slogan dibuat untuk untuk menyampaikan pesan kampanye secara menarik dan dipasang di sekolah-sekolah. Sehingga siswa dapat mengingat selalu bahaya akan pernikahan dini dan pergaulan bebas.

Oh tidak. Disini nggak nyampe radio. Paling ya tulisan-tulisan, di SMP kan banyak mural-mural itu. Seperti ada kalimat “aku gak mau nikah muda, aku mau jadi sarjana”. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Gambar 3.6

Poster Tunda Nikah Dini



Sumber : Dokumentasi Penulis Dari SMPN 2 Saptosari

Tidak hanya penyampaian materi melalui tatap muka dan pemasangan poster tunda nikah dini, edukasi juga diberikan dalam bentuk video yang berisikan film singkat mengenai dampak pergaulan bebas. Dalam video tersebut diceritakan mengenai keluarga *broken home* yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap anak hingga melakukan pergaulan bebas. Setelah menonton video tersebut, para siswa akan dijelaskan kembali apa maksud dari video tersebut serta pelajaran apa yang dapat diambil

Ada KKN juga, ada video singkat. Videonya tentang pergaulan bebas. Ada anak perempuan, trus bapaknya cerai sama ibunya jadi kurang kasih sayang. Terus punya pacar, pacarnya gak bekerja, pergaulannya itu ya sama-sama orang gak berpendidikan gitu. Laki-laki itu pacarnya, suruh apa ya, suruh berbuat gak baik. Pas hari itu anaknya sm ibunya berantem, terus nangis anaknya. Terus dibawa pacarnya itu ke tempat

gelap, terus hamil. (hasil wawancara dengan Yuke, siswi SMPN 2 saptosari pada 5 April 2018)

Pelaksanaan deklarasi di sekolah biasanya dilakukan setiap tahun dimana para peserta merupakan siswa baru yaitu siswa kelas 7. Deklarasi dilakukan dengan memanfaatkan moment masa orientasi siswa dengan memasukan edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas serta pernikahan dini. Namun terkadang pelaksanaannya juga dilakukan di waktu yang lain dengan mengundang orang tua siswa. Menurut Yuke salah satu siswi SMPN 2 Saptosari, program deklarasi dan edukasi ini merupakan hal yang penting karena mereka dapat mengetahui bahaya apa saja yang ditimbulkan akibat pernikahan dini serta pergaulan bebas.

Penting, karena kita itu bisa tahu bahwa bahayanya nikah dini itu kayak gini gitu, bahaya pergaulan bebas. (hasil wawancara dengan Yuke, siswi SMPN 2 saptosari pada 5 April 2018)

b. Uji coba kampanye

Setelah melakukan realisasi unsur-unsur pokok kampanye, maka yang selanjutnya dilakukan adalah uji coba kampanye. Tahap ini merupakan uji coba pelaksanaan kampanye yang dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibentuk sebelumnya untuk menyusun strategi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Melalui uji coba rencana kampanye,

pihak panitia atau tim pelaksana kampanye akan memperoleh gambaran tentang respon awal stakeholder atau masyarakat terhadap pesan-pesan kampanye yang disampaikan.

Pada tahapan ini, tim kampanye tidak melakukan uji coba kampanye, melainkan sosialisasi awal kepada masyarakat sebelum dilakukannya deklarasi serta kampanye yang lebih mendalam. Hal ini dikarenakan program kampanye bukanlah program yang kaku selayaknya program pemerintah berdasarkan APBD daerah, melainkan merupakan hasil swadaya dari para stakeholder yang terkait. Camat Saptosari juga menjelaskan bahwa program ini merupakan program yang tidak direncanakan secara sistematis, melainkan langsung dipraktikkan kepada masyarakat sehingga tidak memerlukan adanya uji coba terlebih dahulu.

Enggak. Ini kan semua murni 100 % swadaya. Gak ada dukungan dana serupiah pun dari pemerintah. Itu kan kami mengawali sekali. Jadi dulu memang cuma swadaya. Jadi kami iuran, rifka ngasih 200-300, saya pribadi, kepala KUA pribadi, trus yang sering dipakai ya kas pengajian ini. Setelah itu kami berhasil baru lain daerah seperti itu, Bupati baru mengadopsi saya untuk dijadikan program 1 kabupaten terus pergubnya, aturan main pergub itu turun setelah saya selesai. Pembuatan banner juga dari kami sendiri. Saat pelaksanaan iya, di jalan-jalan juga iya. Itu betul-betul gerakan. Jadi sampai sekarang kan gaungnya di kecamatan luar dan desa-desa luar itu, jangan main-main nikah dini disini, gak bisa. Sampai masyarakatnya pun tau saptosari itu anti nikah dini. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Namun sebelum kampanye secara intens dilakukan dengan dimulainya deklarasi, tim kampanye sebelumnya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui program-program yang dimiliki oleh Puskesmas, KUA, serta pihak Kecamatan. Dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, maka saat kampanye dilakukan masyarakat tidak terkejut ataupun bingung terkait program kampanye pencegahan pernikahan dini tersebut.

Di desa-desa kita banyak melakukan pendidikan lewat sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, begitu ya itu di beberapa desa waktu itu, lewat pengajian juga, tokoh masyarakat, dengan remaja gitu ya, kemudian dengan PKK, macam-macam lah kita kerjasamanya. Kemudian puskesmas waktu itu dengan program-program puskesmas, KUA juga dengan program-program KUA, Suscaten (khusus calon manten), pendidikan pranikah, begitu. Nah itu semuanya bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi itu menjadi cepat familiar di masyarakat. (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

c. Tindakan pemantauan kampanye

Sebagai sebuah kegiatan yang terprogram dan direncanakan dengan baik, maka segala tindakan dalam kampanye harus dipantau agar tidak keluar dari arah yang ditetapkan. Untuk itu harus dipahami bahwa tindakan kampanye bukanlah tindakan yang kaku dan parsial, tetapi bersifat adaptif, antisipatif, integrative, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

1) Adaptif

Tindakan kampanye yang bersifat adaptif artinya kampanye tersebut terbuka terhadap masukan-masukan baru atau bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat fleksibel sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Dalam melaksanakan sosialisasi, tim kampanye menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada seperti tingkat pemahaman masyarakat serta mengikuti agenda-agenda yang ada di masyarakat. Program kampanye ini sendiri didahului dengan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi seluruh instansi dinas dan sekolah, kemudian dilanjutkan deklarasi ke desa-desa serta sosialisasi yang lebih mendalam lagi.

Tindakan adaptif yang dilakukan sebelum maupun setelah deklarasi adalah dengan sosialisasi dan edukasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu contohnya yaitu edukasi terhadap forum anak desa. Nurmawati dari LSM Rifka Annisa menjelaskan tentang pentingnya edukasi kepada kelompok perempuan dan kelompok remaja desa. Hal ini dikarenakan remaja inilah yang banyak melakukan pernikahan dini. Para remaja ini didorong untuk mengisi waktu mereka melakukan kegiatan positif. Hal ini dilakukan agar hasrat seksual yang dimiliki remaja dapat terkelola dengan kegiatan positif sehingga meminimalisir pemikiran atau kegiatan

negatif yang nantinya dapat membawa ke arah pergaulan bebas yang dapat menyebabkan pernikahan dini itu terjadi.

Di Saptosari itu kan ada 7 desa ya, ada beberapa kegiatan yang kita levelnya kecamatan, kemudian di semua desa kita lakukan pencegahan pernikahan usia dini, pencegahan KDRT begitu, tapi memang ada desa yang memang intens, itu desa Kepek dan desa Jetis. Kalo Kepek itu memang sejak 2013 sudah intens edukasi tentang pencegahan pernikahan usia anak itu sampai sekarang, kemudian kita menguatkan kelompok-kelompok perempuan dan mengaktifkan kelompok-kelompok remaja desa, remaja ini kan harus didorong agar ada aktifitas ya, kegiatan positif sehingga waktu-waktu mereka lebih positif lah, karena di desa itu kan minim kegiatan, jadi wis pengangguran, putus sekolah, luntang-luntung, jadi kan pikirannya cuma negatif doang, pegang gadget, punya pacar kemana-kemana, jadi kan apa namanya itu hasrat seksualnya yang sedang meletup-meletup itu tidak terkelola dengan kegiatan positif. Jadinya kan karena sering dengan pacar, tidak ada aktifitas yang positif ini jadinya kan banyak yang negatif kan, itu salah satu pemicu ya. Makanya kita mendorong forum anak desa itu diaktifkan di desa Kepek, mereka diberikan kapasitas dan mereka sendiri yang mensosialisasikan itu. Misalnya waktu itu ke SMP-SMP, ke pertemuan forum anak di dusun-dusun, desa itu kan ada 6 dusun ya rata-rata, kemudian mereka melakukan aktifitas positif, macem-macem lah, sampai forum anak desa itu juga diberikan anggaran oleh desa. (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

Kemudian terdapat pula edukasi kepada kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa-desa kecamatan Saptosari diantaranya FPK2PA (Forum Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam edukasi tersebut mereka didorong untuk

melakukan sosialisasi sendiri di level desanya misalnya saja PKK maupun di lingkungan sekitar mereka. Sehingga diharapkan hasil edukasi mengenai isu pernikahan dini, kesehatan reproduksi, kemudian tentang pengasuhan yang diberikan dapat disebarluaskan oleh kelompok perempuan tersebut baik dalam kelompok yang lain maupun dalam keluarga mereka.

Kemudian kalo di kelompok yang perempuan, kita menguatkan di FPK2PA mitra keluarga, jadi kita juga memberikan kapasitas, menguatkan kelompoknya, memberikan edukasi, kita juga ikut sosialisasi ya di awalnya, kemudian mendorong mereka untuk melakukan sosialisasi sendiri di level desa begitu. Jadi di masing-masing isu tentang pencegahan pernikahan usia anak, kemudian pengasuhan, kesehatan reproduksi, begitu. Jadi itu yang kita lakukan, selain itu juga dengan ini ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, itu kita bekerjasama dengan KUA, kita menguatkan perspektifnya. (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

Selain penguatan dan edukasi pada kelompok-kelompok perempuan, tindakan adaptif lainnya adalah menasar kepada sosialisasi dan edukasi pada tokoh agama. Tokoh agama merupakan sasaran yang penting dikarenakan mereka yang memiliki forum pengajian sehingga diharapkan dapat menjadi pelaku penyebaran sosialisasi pula di ruang lingkup pengajiannya. Melalui tokoh agama, tim kampanye melakukan edukasi dengan mengubah

perspektif mereka terhadap isu pernikahan dini bahwa pernikahan dini itu tidak baik.

Kemudian tokoh agama itu menjadi penting karena kan mereka yang banyak isi pengajian tuh, mereka yang punya kelompok-kelompok pengajian, kemudian kan di KUA itu ada penyuluhan PNS non PNS itu yang mereka rutin punya binaan mesjid mana-mana, itu bisa remaja, bisa orang dewasa, nah kita memberikan kapsitas ke tokoh agama itu untuk membuka perspektifnya bahwa pernikahan anak itu sesuatu yang tidak baik lah. (hasil wawancara Nurawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

Bentuk sosialisai kepada tokoh agama sendiri membuka perspektif dan paradigma dari sisi agama juga sosial. Dalam sosialisasi tersebut dibahas bahwa pernikahan dini yang memang banyak *mudharat* atau kerugiannya dapat dikategorikan haram. Maka ketika banyak dampak negatifnya, sebagai ulama sudah seharusnya mengingatkan masyarakat. Dengan sosialisasi dan edukasi tersebut, maka nantinya tokoh agama tidak lagi hanya membahas urusan surga dan neraka, melainkan juga menyinggung soal kemanusiaan.

Ketika banyak dampak negatifnya, maka kita sebagai tokoh agama, sebagai ulama disitu wajib mengingatkan bahwa itu sesuatu yang berdampak tidak baik. Jadi tokoh agama itu mulai ngomong tu bukan hanya urusan surga neraka, tapi juga nomongin soal sosial, soal kemanusiaan gitu, dampaknya di laki-laki apa di perempuan apa. Itu kita membuka paradigma tokoh agama dan meskipun mereka

juga punya catatan2 sendiri ya, meskipun sudah terlanjur hamil itu gak mau nikah. Nah kalo soal begitu kita gak bisa memaksa gak boleh nikah ya, tapi itu pilihan si korban kesiapannya dia. Menikah juga gak ada jaminan. (hasil wawancara Nurawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

Pentingnya mengedukasi dan mensosialisasikan tokoh agama selain karena kelompok pengajian yang mereka miliki adalah berkaitan dengan nikah siri. Hal ini dikarenakan ketika dispensasi pernikahan ditolak oleh pihak KUA karena komitmen pencegahan pernikahan dini, maka yang masyarakat yang tetap ingin menikahkan putra dan putrinya akan memilih jalur menikah siri. Pernikahan siri pun akan dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Dikarenakan kasus ini pula, tim kampanye melalui KUA dan LSM Rifka Annisa memberikan pemahaman bahwa menikah siri justru beresiko besar terhadap pihak perempuan dikarenakan tidak adanya bukti yang sah secara hukum, dan resiko perempuan ditelantarkan juga besar. Sehingga jika terdapat masalah dalam rumah tangga tersebut, pihak perempuan tidak dapat menuntut secara hukum dan menjadi pihak yang dirugikan.

Kemudian ada kecenderungan ketika dispensasi nikahnya ditolak, kemudian nikah siri juga ada, meskipun aku tidak bisa nyebut angka ya. Nah akhirnya kita berikan pemahaman ke tokoh agama karena yang nikahin kan mereka. Belum tentu nikahnya ke KUA lho, nikah siri kan

gak ke KUA. Yang penting terikat dulu secara agama, mungkin khawatir nanti hamil, ya udah dinikahkan saja, nikah siri. Padahal resikonya kan besar ke perempuan, dia bisa ditinggal, buktinya apa kalo dia sudah nikah. Kemudian resiko-resiko itu yang kemudian kita diskusikan kepada tokoh agama dan kita mendorong mereka untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang lebih luas, dari perspektif agama. Itu yang kita lakukan. (hasil wawancara Nurmawati sebagai Manager Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi pada 19 Januari 2018)

2) Antisipatif

Tindakan kampanye bersifat antisipatif maksudnya kegiatan kampanye harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan muncul di lapangan saat kampanye dilakukan dengan bersifat antisipatif pelaku kampanye telah mempersiapkan berbagai alternatif pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul.

Salah satu tindakan antisipatif yang dilakukan pemerintah kecamatan Saptosari adalah bekerjasama dengan pihak pengadilan agama saat ada yang tetap memaksa untuk menikah dini. Misalnya saja dulu terdapat salah satu tokoh agama yang ada di kecamatan Saptosari bersikeras memperbolehkan terjadinya pernikahan dini. Ketika diskusi dengan pihak kecamatan tidak memperoleh kesepakatan, maka pihak kecamatan mengusulkan untuk menemui pihak pengadilan agama untuk sidang perijinan pernikahan dini.

Namun oleh pihak kecamatan terlebih dahulu telah menghubungi pihak pengadilan agama agar permohonan tokoh agama tersebut tidak dikabulkan.

Banyak strategi, tapi apa ya, ada yang legal ada yang enggak. Contohnya, jadi strateginya salah satunya pernah ada di Krambilsawit itu malah tokoh agama, memang kalau kita tinjau dari sudut agama, cewek itu kan dewasa setelah mens, cowok setelah mimpi dan sebagainya, itu kan cowok cewek 15 tahun sudah mens/baligh kan kalau sekarang. Dari sudut agama kan itu legal. Tapi kan di sudut undang-undang kan jelas, Undang-undang perkawinan itu kan kalau cewek 16 th cowok 19 th, nah itu orangnya bersikeras. Istilahnya dia mengeluarkan banyak dalil, akhirnya kan kami ndak kuat juga, istilahnya dia memaksa begitu. Ya sudah trus ada pengantar dari sini, kemudian dia disuruh ke pengadilan agama. Tapi ini rahasia ya, kita mengkontak hakim yang ada disana agar jangan dikabulkan. Ya itu kan istilahnya strategi yang ekstrim lah, gak bener juga mosok saya memberikan pengantar untuk sidang kesana tapi saya malah kontak gak usah dikabulkan. Ya itu salah satu strategi, memang kita gak papa menghalalkan banyak cara yang penting kan tujuan kita memang baik. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 20 November 2017)

3) Orientasi pemecahan masalah

Tindakan kampanye yang bersifat *problem solving oriented* artinya segala bentuk tindakan dalam proses kampanye diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika dalam pelaksanaannya muncul permasalahan yang dapat menghambat tujuan dari kampanye, maka para pelaku atau panitia kampanye harus dapat memikirkan cara memecahkan masalah tersebut. Masalah yang

muncul tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa mencari solusi pemecahannya.

Dalam pelaksanaan kampanye ini, terdapat permasalahan yang muncul yaitu masih adanya warga yang memaksa untuk tetap menikahkan anak-anaknya. Untuk mengatasi masalah yang muncul tersebut, Camat Saptosari akan meminta pihak orang tua beserta anak yang akan menikah untuk datang ke kantor kecamatan. Disana akan dilakukan diskusi dengan didampingi salah satu wakil dari polsek Saptosari menjelaskan mengapa tidak diperbolehkan menikah dini. Namun diantara warga tersebut, masih terdapat pula pihak yang tetap memaksa ingin menikahkan anaknya bahkan mengaku telah hamil. Kemudian pihak kecamatan memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Jika hasilnya negatif, maka pernikahan tetap tidak dapat dilakukan dan polsek akan menjelaskan jeratan hukum atau undang-undang mengenai perlindungan anak, namun jika memang diketahui hamil maka dengan terpaksa diijinkan menikah.

Pak KUA itu meskipun tidak ada keharusan, karena sudah komitmen deklarasi tadi, setiap yang mau nikah kurang umur, tidak langsung dispensasi ke pengadilan agama, tapi langsung kita panggil dulu. Di tempat ini, nanti pak kepala polsek, kepala KUA, Puskesmas, Koramil, kita panggil orang tuanya dua-duannya. Kenapa kok mau nikah. Akhirnya biasanya trus mundur. Ada yang bilang sudah hamil. Kalo sudah hamil nanti kita ijin karena terlanjur meskipun nanti tetap sidang lama, tapi banyak yang nipu, jadi nanti begitu dia ngomong mau

nikah karena sudah hamil, langsung saya suruh ke puskesmas, kepala puskesmasnya kan disini, nanti pegawainya telpon bilang gak hamil pak, berarti kan bohong. Berkali-kali seperti itu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si pada 20 November 2017)

Pemecahan masalah dengan cara tersebut juga diungkapkan oleh mantan Kepala Puskesmas Saptosari, bahwa mereka yang bersikeras menikah bahkan sampai berbohong mengaku telah hamil akan tetap diperiksa terlebih dahulu. Jika masih bersikeras juga, maka camat akan bertindak tegas dengan membawa dasar hukumnya.

Kalo di lurah tidak mampu, yang ngeyel saja kan pasti ada to. Sampai kecamatan nanti pak camat juga melihat. Bahkan sampai kejadian pak camat itu ya istilahnya diprotes gitu, karena ini sudah jadi, dia dengan alasan karena ini anak sudah hamil duluan, sudah nyebar undangan segala macam, harus mendapat rekomendasi begitu. Itukan ada kerjasama nih, tim camat udah solid. Dia kan alasannya hamil duluan, oleh pak Camat dikirim ke puskesmas ni, betul ndak ni sudah hamil belum. Di puskesmas di tes kehamilan, ternyata tidak, kita telpon, ini negatif. Masih nekad ni, sehingga pak camat berani bilang ini bohong, sebaiknya ditunda, ini kalo mau diteruskan, jengengan ngengkel, saya juga ada dasar hukum, berarti ini pembohongan, kalo nekad gini saya ada dasar hukum. Akhirnya dia mundur, gak jadi, menunda. Jadi itu langkah-langkahnya. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Pernyataan Camat Saptosari dan mantan Kepala Puskesmas Saptosari mengenai pencegahan pernikahan dini terhadap keluarga yang tetap memaksa akan menikahkan anak mereka juga disampaikan oleh Kepala KUA Saptosari. Namun terdapat perbedaan kasus yang

terjadi. Pihak keluarga yang memaksa ingin menikahkan anak mereka dikarenakan anak perempuannya telah hamil. Setelah diskusi atau disidang di kantor kecamatan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak kecamatan dan KUA akhirnya mengizinkan dengan syarat harus mendapat putusan dari pengadilan agama yang mengizinkan mereka untuk menikah.

Adanya itu karena suatu hal dimasyarakat, yang kalau tidak dinikahkan itu bahaya, karena hamil. Sehingga anak yang dikandung punya ayah. Ada kemarin, kita sidang orang tuanya, lurah, dan dukuhnya kita sidang. Kenapa bisa demikian. Sehingga kalau hamil tersebut orang tua si wanita tidak terima, ini walaupun sudah senang, yang menghamili ini bisa kena pasal. Disidang begitu sudah nerima, sehingga mengarah kepada bisa dinikahkan dengan syarat ijin dari pengadilan agama. Sidang dulu, kemudian putusannya dibawa kesini. Harus ada putusan pengadilan. (hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Saptosari Drs. H. Isnanto, SH.,M.A, pada 18 September 2017)

4) Integrative dan koordinatif

Keberhasilan kampanye ditentukan oleh bagaimana pelaksana kampanye bertindak secara integrative dan koordinatif. Disini manajer kampanye membutuhkan sebuah sistem untuk dapat tetap berhubungan dan berkoordinasi dengan tim pelaksana kampanye, lewat sistem seperti itu maka perkembangan dan pelaksanaan kegiatan kampanye dapat terpantau secara rutin dan sistematis.

Pelaksanaan kampanye pencegahan pernikahan dini sendiri dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan banyak pihak yaitu Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA, Kepala Desa, Lurah, dan tokoh masyarakat lainnya. Dengan adanya komitmen bersama, kampanye dapat dilakukan dengan meluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Sistem koordinasi dijalankan oleh Camat Saptosari melalui pengajian rutin yang dilaksanakan setiap bulannya. Selain itu koordinasi terkadang juga dilakukan disela-sela acara formal ataupun non formal.

Iya ada. Kita kan sering komunikasi nih. Jadi komunikasi setiap saat. Kita kan setiap ada masalah ketemu. Pertemuan khusus ya kalau itu tadi ada tamu, ketemu nih. Jadi tidak harus secara sebulan, dua bulan begitu. Inikan istilahnya sudah komitmen ya, jadi tidak perlu harus kaku. Kalo itu kan mengacu dana, kita kan tidak mengacu dana. Kita enggak menunggu dana harus ada. Setiap pertemuan kita ngomong-ngomong seperti itu. Oh sana masih ada lho rekomendasi nikah lho, oh mana desa mana. kemarin ada kematian bayi di des asana, nah itu kita bicarakan. Jadi enak komunikasinya. Jadi informal tadi ini berjalan. Tidak kaku. Jadi tidak perlu surat dan sebagainya, tinggal pak camat telpon iya siap berangkat. Jadi kita enjoy saja. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

d. Laporan kemajuan

Unsur terakhir dari proses pelaksanaan kampanye adalah penjadwalan laporan kemajuan atau progress report. Laporan kemajuan merupakan dokumen yang sangat penting, bukan hanya bagi manajer tapi juga

pelaksana kampanye secara keseluruhan. Dalam laporan kemajuan umumnya dimuat berbagai data dan fakta tentang berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kampanye. Data yang disajikan umumnya bukan hanya berkaitan realisasi rencana kampanye tapi juga mencakup berbagai temuan lapangan baik yang positif atau negatif. Dengan demikian laporan kemajuan menyediakan semacam evaluasi kecil yang bersifat rutin terhadap berbagai proses kampanye yang sedang berjalan.

Pada tahap ini, pemerintah kecamatan Saptosari tidak melakukan penjadwalan laporan kemajuan secara tertulis. Laporan mengenai kemajuan atau progress report kampanye dilakukan melalui forum pengajian rutin bulanan dan dengan memantau data pernikahan dini yang ada di KUA.

Oh sering. Setiap forum pengajian kan kita sampaikan progressnya, kita evaluasi. Kita kan mantaunya lewat KUA. Lagipula setiap ada yang mau nikah dini, itu pasti kan ke saya dulu. Jadi bisa terpantau 100 persen. Setiap mau ada pernikahan yang kurang usia, pasti ke saya. Itu saya haruskan. Padahal aturannya kan enggak. KUA itu kalau dia mau langsung ke pengadilan agama, gak masalah. Tapi karena sudah komitmen tadi setiap ada mau nikah muda pasti kita undang kesini, orang tuanya dua pihak, kita ketemu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Selain melihat data pernikahan dini di KUA, pemantauan juga dilakukan Kepala Puskesmas dengan melihat data laporan pencapaian setiap bulan terkait masalah gizi buruk, anemia hingga kesehatan ibu dan anak. Dengan memantau data tiap bulan yang ada, hal ini sekaligus

menjadi evaluasi rutin melihat apakah kampanye dinyatakan berhasil atau tidak. Data yang telah dilihat tersebut nantinya akan dibahas melalui diskusi informal ataupun pengajian rutin bulanan tersebut.

Ya dipantau, jadi kalo di puskesmas setiap bulan itu kan ada laporan pencapaian itu, gizi buruknya berapa, angka anemia nya berapa, angka yang kurang gizinya berapa, masih ada atau tidak kasus kematian, itu kan kita tahu setiap bulannya. KUA juga sama, angka perceraianya naik gak ni, ada dispensasi nikah dini apa tidak, mereka kan punya data. Jadi itu kita memantau sendiri-sendiri programnya. Kemudian kecamatan, desa mana ni yang paling banyak meminta rekomendasi, pak camat ini yang memantau ke desa-desa. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

3. Evaluasi Kampanye

Langkah terakhir dan juga sangat penting dalam kampanye adalah evaluasi. evaluasi dilakukan guna melihat apakah program kampanye yang telah dilaksanakan berjalan sesuai yang direncanakan atau tidak serta melihat sejauh mana keberhasilan yang dicapai. Pada tahap ini panitia kampanye melakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat data setiap bulannya progres apa yang telah dicapai, misalnya apakah ada penurunan angka di KUA serta Puskesmas. Evaluasi yang dilakukan bukanlah berupa laporan tertulis mengenai kegiatan kampanye, namun lebih berupa forum diskusi untuk menyampaikan hasil.

Oh sering. Setiap forum pengajian kan kita sampaikan progresnya, kita evaluasi. Jadi bagaimana, ini bulan ini disini ada 2, ini kan di 2017 ini sudah ada 2, tapi cowoknya yang kurang umur semua, pergaulan bebas juga. Tapi syukurnya cowoknya orang luar

kecamatan sini, saya suruh nikah di luar sana. Maksudnya gak tercatat nikah disini. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

Selain melihat penurunan data pernikahan dini yang ada di KUA serta penurunan masalah kehamilan atau kematian ibu dan bayi di puskesmas, keberhasilan kampanye ini juga dilihat dari meningkatnya minat siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Hal ini terlihat pada saat pendaftaran siswa baru SMK di Saptosari yang mampu melebihi kuota sehingga Camat harus meminta rekomendasi ke dinas pendidikan kabupaten untuk menaikkan batas kuota siswa SMK.

Kalo waktu itu kita kampanyenya 19 tahun. Jadi waktu kita deklarasi itu minimal 19 tahun, syukur bisa 20 tahun keatas. 16 tahun itu kan undang-undangnya, tapi kampanye kita itu 19 tahun. Kampanye kita kita tekankan umur segitu. Anak-anak kita berikan wawasan,dan bisa bagus. Bahkan waku itu setelah kampanye kita evaluasi. Sebelumnya itu yang masuk SMK itu kecil atau rendah, jadi bertahun-tahun itu kurang muridnya. Setelah kampanye itu mbludak ini. Yang datang ke SMK itu naik luar biasa, bahkan waktu itu sampai nolak lebih dari 1 kelas. Terus waktu itu kan kelasnya tidak ada, kemudian pak camat meminta rekomendasi ke pendidikan kabupaten untuk biasa ditampung. Kan eman-eman, mereka sudah kita motivasi untuk meneruskan tidak kawin dulu, mereka mau meneruskan sekolahnya, kalo gak ketampung kan kasihan. Pak camat sendiri yang ke dinas pendidikan kabupaten. Akhirnya diijinkan, jadi batas kuotanya itu dinaikan. Padahal dulu seanjang tahun kurang, sepi. Begitu kita sosialisasikan, malah luar biasa semua mau meneruskan sekolah. Bahkan di SMK itu ada kelompok untuk penundaan pernikahan dini oleh mereka sendiri. Jadi angka pendidikannya naik, kemiskinannya juga mulai turun. Pola asuhnya juga lebih bagus. (hasil wawancara mantan Kepala Puskesmas Saptosari, Sugimin, SKM.,MM pada 24 Januari 2018)

Menurut Camat Saptosari, kampanye ini sudah berhasil menyadarkan warga mengenai kebiasaan atau budaya mereka yang menikahkan anak yang masih di bawah batas usia pernikahan. Namun yang menjadi tantangan selanjutnya adalah mengenai pergaulan bebas, karena pernikahan dini dapat kembali terjadi jika anak tidak terkontrol hingga menyebabkan KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Untuk itu Camat Saptosari memiliki rencana kedepan akan dibentuknya satgas anti pergaulan bebas yang terdiri dari polisi, tentara, limnas, dan korkam Saptosari untuk melakukan operasi di lokasi-lokasi tertentu dimana banyak berkumpulnya anak-anak lawan jenis.

Tadi kan sebabnya ada 2, satu masalah budaya atau kebiasaan, kedua masalah pergaulan bebas. Kalau masalah budaya dari orang tua sudah tidak ada, saya yakin itu sudah tidak akan kambuh lagi karena mereka sudah sadar kalo nikah anak itu nanti banyak akibatnya. Tapi kalau yang masalah pergaulan bebas kan sama sudah sampai nasional bahkan internasional ya, yaitu yang mesti harus dicermati. Ini sekarang sebentar lagi kami akan membuat satgas anti pergaulan bebas. Nanti terdiri dari polsek/polisi, tentara, satgas, limnas, sampai ke korkam, dan sebagainya itu, nanti kita rajin operasi. Tiap minggu, rencana ya ini, jadi kemarin sudah kita rebug tapi belum terbentuk. Sekarang kan tiap sabtu, malam minggu di pantai banyak orang *camping*, mahasiswa-mahasiswa itu, kan cowok cewek juga, nah itu kan kita biarkan sekarang, padahal itu kan cowok cewek satu tenda, itu nanti kita operasi. Setiap malam minggu kan banyak anak-anak pacaran itu, nanti ada kewajiban kita untuk mendatangi, kita bawa ke polsek. Saya gak ingin saptosari nanti jadi tempat seperti itu, banyak mahasiswa cowok cewek satu tenda, kan bahaya itu. (hasil wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP.,M.Si pada 20 November 2017)

B. PEMBAHASAN

Menurut Venus (2012:152) strategi kampanye merupakan pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam kampanye, atau lebih mudahnya dapat disebut sebagai *guiding principle*, atau *the big idea*. *Guiding principle* atau *the big idea* ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang diambil untuk menuju pada suatu kondisi tertentu dari posisi saat ini, yang dibuat berdasarkan analisis masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kampanye sendiri memiliki arti suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (*A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing a specified audience*). (Pfau dan Parrot, 1993, dalam Antar Venus : Manajemen Kampanye Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004 dalam Liliweri, 2011:676).

Strategi kampanye terdapat 3 tahapan yaitu perencanaan kampanye, pelaksanaan kampanye, dan evaluasi kampanye. Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas strategi kampanye secara keseluruhan karena adanya keterkaitan dalam setiap komponen, sehingga tidak terbagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Analisis Masalah

Menurut Gregory Anne (2014 : 40) analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan. Setelah riset, tahap berikutnya adalah analisis dan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar program PR. Venus (2012: 146) menjelaskan bahwa agar dapat diidentifikasi dengan jelas, maka analisis masalah hendaknya dilakukan secara terstruktur. Pengumpulan informasi yang berhubungan dengan permasalahan harus dilakukan secara objektif dan tertulis serta memungkinkan kembali untuk dilihat kembali setiap waktu. Hal ini dapat menghindarkan terjadinya permasalahan yang tidak tepat.

Ada 2 jenis analisis yang digunakan untuk perencanaan program kampanye yaitu analisis PEST (*Political, Economic, Social, and Technology*) yang secara khusus mempertimbangkan empat aspek penting yang terkait langsung dengan proses pelaksanaan kampanye dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*).

Dari 2 jenis analisis masalah yang dipaparkan oleh Venus, tim kampanye pemerintah kecamatan Saptosari tidak melakukan dengan salah satu cara tersebut. Hal ini dikarenakan proses perencanaan kampanye ini bukanlah program kampanye yang tertulis dan terstruktur. Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP., M.Si menjelaskan bahwa langkah awal dalam kampanye pencegahan pernikahan dini adalah bermula dari kekhawatiran berbagai pihak

terhadap angka kasus pernikahan dini yang tinggi serta berakibat ke banyak hal seperti perceraian dan angka kematian ibu dan bayi yang juga tinggi.

Pembahasan mengenai permasalahan pernikahan dini awalnya merupakan diskusi informal atau hanya sekedar percakapan antara pemimpin lembaga kedinasan disana yaitu Camat Saptosari, Kepala KUA, serta Kepala Puskesmas. Pembicaraan berawal dengan memaparkan masalah-masalah yang dihadapi seputar jangkauan pekerjaan masing-masing. Camat membicarakan masalah sosial ekonomi masyarakat yang masih di garis kemiskinan, Kepala Puskesmas membicarakan masalah kesehatan ibu dan bayi serta kekurangan gizi, dan Kepala KUA membicarakan tingginya angka dispensasi pernikahan serta perceraian. Melalui perbincangan para pemimpin instansi tersebut, diketahuilah bahwa kasus pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah yang baru. Bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan terhadap masalah kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Langkah pemerintah dalam menganalisis masalah pada awalnya tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Cutlip,dkk (2011:335) berkaitan dengan metode informal. Metode informal sendiri masih mendominasi riset PR, meskipun metode ilmiah yang sudah maju sudah tersedia. Tetapi metode informal dapat berguna, jika praktisi mengakui kelemahan dan tujuannya. Jika dilihat sebagai metode yang baik untuk mendeteksi dan mengeksplorasi situasi problem dan untuk uji awal riset dan strategi program, maka metode informal sangat

berguna. Beberapa metode informal yang dapat dilakukan adalah kontak personal, informan kunci, kelompok fokus dan forum komunitas, komite dan Dewan Penasihat, Ombudsman dan Pejabat Ombuds, saluran telepon bebas, analisis surat, sumber online, laporan lapangan.

Metode informal melalui informan kunci yakni pendekatan ini dilakukan dengan memilih dan mewawancarai pimpinan yang punya banyak pemahaman dan pengalaman. Wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka dimana individu yang telah dipilih diminta untuk berbicara tentang suatu problem atau isu menurut pendapat mereka sendiri. Basis untuk pemilihan informan kunci adalah pengetahuan mereka tentang isu dan kemampuan mereka untuk mewakili pandangan orang lain.

Selain melakukan wawancara terhadap para pemimpin, pemerintah kecamatan Saptosari juga membahas atau menganalisis masalah dengan cara diskusi melalui pengajian bulanan yang diikuti oleh para pegawai dinas yang bekerja di Saptosari. Dalam pengajian tersebut seringkali membahas mengenai masalah yang terjadi dalam lingkup kecamatan Saptosari, salah satunya juga membahas mengenai masalah pernikahan dini tersebut. Metode diskusi dalam forum ini juga merupakan metode informal dalam menganalisis masalah. Gregory, Anne (2004:54) menjelaskan bahwa kelompok fokus atau *focus group* adalah diskusi berkelompok yang anggotanya adalah individu-individu yang telah diseleksi secara khusus (mungkin berdasarkan profil yang sama, atau mungkin dari kelompok usia, jenis kelamin dan lokasi yang sama,

namun memiliki latar belakang yang berbeda-beda). Jika dilakukan dengan benar, focus grup akan memberikan lebih banyak informasi daripada wawancara tatap muka.

Berdasarkan langkah-langkah analisis masalah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Saptosari, menurut penulis hal tersebut sudah tepat. Pemilihan metode informal dipilih dikarenakan mereka menyadari adanya kelemahan dalam menganalisis masalah dengan metode yang terstruktur dan kaku serta melihat tujuan kampanye yang akan dilakukan. Dalam riset metode informal tersebut, diketahui bahwa masalah utama tingginya angka pernikahan dini adalah dilatarbelakangi oleh budaya yang ada pada masyarakat serta pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja. Hal tersebut terungkap saat mereka melihat data di KUA mengenai penyebab masyarakat melakukan pernikahan dini. Selain itu melalui diskusi diketahui pula tentang pandangan masyarakat mengenai budaya yang menyatakan jika sudah ada yang menginginkan anak perempuan mereka, maka harus segera dinikahkan karena takut “pamali” atau dicap tidak laku nantinya. Faktor ekonomi juga menjadi alasan para orang tua ingin menikahkan anak mereka agar dapat segera melepaskan tanggung jawabnya. Jika faktor budaya berkaitan dengan sudut pandang orang tua, maka penyebab lainnya dari faktor anak adalah kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Minimnya pengetahuan seputar kesehatan reproduksi atau akibat dari pergaulan bebas, serta mudahnya akses internet atau konten pornografi mengakibatkan perilaku

remaja mudah terjebak dalam pergaulan bebas. Sehingga jika sudah terjadinya KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan) maka remaja tersebut harus menikah, sehingga dapat menimbulkan angka pernikahan dini yang tinggi di kecamatan Saptosari.

Selain mengetahui penyebab tingginya kasus pernikahan dini, Camat Saptosari juga melakukan diskusi dengan para kepala sekolah yang ada di Saptosari. Pernikahan dini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, namun juga rendahnya angka siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/SMK. Hal ini juga tentunya membuat tinggi pula angka kemiskinan. Pasangan yang telah menikah, tentunya harus membuat Kartu Keluarga (KK) yang baru, namun dikarenakan belum mampunya mereka mandiri secara ekonomi, tentunya menyebabkan munculnya KK miskin yang baru. Rendahnya pendidikan dapat menjadi salah satu hambatan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang bagus, sehingga mereka yang hanya lulusan SMP kesulitan dalam menafkahi keluarga.

Berdasarkan riset metode informal dengan diskusi banyak pihak tersebut, pemerintah kecamatan Saptosari dapat mengetahui bahwa tingginya kasus pernikahan dini ternyata dapat menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai aspek, diantaranya tingginya angka kemiskinan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta dapat berdampak pada tingginya angka perceraian.

2. Menetapkan Tujuan

Langkah kedua dalam melakukan perencanaan kampanye adalah menetapkan tujuan. Setelah analisis masalah diketahui, maka dilakukan penyusunan tujuan guna menyelesaikan masalah tersebut. Gregory, Anne dalam bukunya *Perencanaan dan Kampanye Public Relations* (2004:65) menjelaskan menetapkan tujuan yang realistis adalah sangat penting apabila program atau kampanye yang direncanakan harus memiliki arah dan dapat menunjukkan suatu keberhasilan tertentu.

Gregory, Anne (2004:65) juga memaparkan mengenai bagaimana menetapkan tujuan yang realistis. Tujuan biasanya ditetapkan di salah satu dari tiga level berikut :

- Kesadaran (*awareness*) : membuat publik sasaran anda untuk berpikir tentang suatu hal dan mencoba untuk memperkenalkan suatu tingkat pemahaman tertentu. Semua itu bisa disebut dengan tujuan *kognitif* (pemikiran).
- Sikap dan opini (*attitude and opinion*) : membuat publik sasaran anda untuk membentuk suatu sikap atau opini tertentu tentang suatu subjek. Semua itu disebut sebagai tujuan *afektif*.
- Perilaku (*behaviour*) : membuat publik sasaran anda untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Ini disebut tujuan *konatif*.

Pemerintah kecamatan Saptosari sendiri memiliki tujuan yaitu meniadakan terjadinya pernikahan dini sehingga diharapkan kasus perceraian serta kematian ibu dan bayi juga dapat menurun. Menurut penulis penentuan tujuan tersebut sudah tepat dan realistis mengingat kasus-kasus yang muncul diakibatkan oleh pernikahan dini. Penentuan tujuan tersebut berada pada level ketiga yaitu perubahan perilaku (*behavior*). Namun dalam penentuan tujuan tersebut tentunya juga melibatkan dua level sebelumnya yaitu kesadaran (*awareness*) serta sikap dan opini (*attitude and opinion*), karena perubahan perilaku dapat tercapai apabila telah melalui kedua tahap tersebut. Ketiga level tersebut tentunya saling berkaitan karena jika pemerintah ingin menyoal kepada perubahan perilaku masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini, maka langkah awal yang dilakukan adalah membuat masyarakat tahu dan sadar akan dampak negatif dalam melakukan pernikahan dini. Setelah masyarakat menyadari dampak tersebut, pemerintah kemudian harus membuat agar masyarakat menentukan sikap untuk tidak menyetujui pernikahan dini. Dengan adanya sikap menolak atau tidak menyetujui terjadinya pernikahan dini tersebut, barulah tingkat perubahan perilaku yaitu tidak melakukan pernikahan dini tersebut dapat tercapai.

3. Menentukan Sasaran atau *Stakeholder*

Setelah menentukan tujuan yang akan dicapai, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan sasaran. Menurut Venus (2012:149) identifikasi dan segmentasi sasaran dilakukan untuk menjawab pertanyaan “who shall I talk to?” Hal ini diperlukan karena kampanye tidak bisa ditujukan kepada semua orang secara serabutan.

Identifikasi dan segmentasi sasaran dilakukan dengan melihat karakteristik secara keseluruhan, kemudian dipilih yang mana yang akan menjadi sasaran program kampanye. James Gruning (Gregory: 2000) dalam Venus (2014:150) membagi publik dalam 3 jenis :

- *Latent Public*, yaitu kelompok yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan isu kampanye, namun tidak menyadarinya
- *Aware Public*, yaitu kelompok yang menyadari bahwa permasalahan tersebut ada
- *Active Public*, yaitu kelompok yang mau bertindak sehubungan dengan permasalahan tersebut.

Dalam menentukan identifikasi dan sasaran tersebut, pemerintah kecamatan Saptosari juga membaginya sesuai dengan jenis publik. Pada kelompok *Latent Public* terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan dini, mereka yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan isu kampanye namun tidak menyadarinya. Pada jenis kedua ada *Aware Public*, pada kelompok ini

terdapat para pemimpin masyarakat dan instansi yang menyadari bahwa permasalahan tersebut ada yaitu Kepala Desa, Kepala Sekolah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta para karyawan dinas yang tergabung dalam pengajian rutin bulanan. Terakhir yaitu *Active Public* merupakan kelompok yang mau bertindak sehubungan dengan permasalahan tersebut, yaitu Camat Saptosari, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kapolsek, serta Sie. Kesejahteraan Sosial yang mana juga merupakan panitia dalam pelaksanaan kampanye tersebut.

Menurut Venus (2012:149) dengan melakukan identifikasi dan segmentasi sasaran maka proses perencanaan selanjutnya akan lebih mudah, hingga akhirnya akan melancarkan pelaksanaan kampanye. Untuk mempermudah proses identifikasi dan segmentasi sasaran perlu dilakukan pelapisan sasaran, yaitu sasaran utama, sasaran lapis satu, sasaran lapis dua dan seterusnya sesuai tujuan kampanye.

Pembagian sasaran ke dalam tiga kelompok publik tersebut juga secara tidak langsung dilaksanakan pelapisan sasaran dalam melaksanakan program kampanye yaitu deklarasi stop pernikahan dini. Deklarasi yang berisikan tentang perjanjian untuk tidak melakukan pernikahan dini serta membiarkan pernikahan dini terjadi pada tahap awal dilakukan oleh para instansi dinas yaitu Kepala Puskesmas, Kapolsek, Kepala KUA, Kepala Desa, Tokoh Agama, serta Kepala Sekolah yang ada di Saptosari khususnya SMP dan SMA/SMK. Pada tahap awal tersebut seluruh pihak menandatangani lembaran yang berisikan perjanjian/deklarasi dan selanjutnya berkewajiban

untuk menyebarkan deklarasi dan sosialisasi di sektornya masing-masing. Kepala desa bertanggung jawab terhadap dukuh serta ketua RT dan RW kemudian akan disebarkan kepada masyarakat dalam agenda rutin mereka, misalnya rapat desa atau RT, PKK, dan sebagainya. Kemudian Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap sekolah yang dipimpinnya, inilah yang menjadi tahap awal munculnya deklarasi di sekolah bersama orang tua siswa, sedangkan Tokoh Agama nantinya diharapkan dapat menyebarkan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini dalam lingkungan sekitar atau pengajiannya. Metode pelapisan ini menurut penulis sudah efektif karena sasaran masyarakat yang luas tentunya tidak dapat seluruhnya dijangkau langsung oleh pemerintah, namun melalui tahapan-tahapan tersebut tentunya dapat lebih efektif.

4. Menentukan Pesan

Pesan merupakan pernyataan spesifik dengan ruang lingkup tertentu, dan didalamnya terkandung tema atau ide utama. Sebuah tema kampanye dapat diturunkan menjadi berbagai variasi pesan yang disesuaikan dengan kondisi sasaran (Venus, 2012:151). Tujuan kampanye dapat tercapai apabila pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh khalayak atau masyarakat yang kita tuju. Menurut Venus (2012:71), seorang komunikator harus memperhatikan bagaimana ia mengemas sebuah pesan karena hal itu akan menentukan efektifitas komunikasi yang dilakukannya.

Gregory, Anne (2004:95) memaparkan terdapat empat langkah untuk menentukan pesan :

- Langkah pertama adalah menggunakan persepsi yang sudah ada.
- Langkah kedua adalah menjelaskan pergeseran yang dapat dilakukan terhadap persepsi tersebut
- Langkah ketiga adalah mengidentifikasi unsur-unsur persuasi. Cara terbaik melakukannya adalah berdasarkan fakta.
- Langkah keempat adalah memastikan bahawa pesan tersebut dapat dipercaya dan dapat disampaikan melalui PR.

Selain langkah-langkah dalam menentukan pesan, terdapat pula cara yang baik agar pesan menjadi efektif. Pesan kampanye yang efektif adalah pesan yang menginformasikan dengan segera kejadian penting yang sedang terjadi di sekitar khalayak sasarannya, sehingga mudah dikenal dan ditanggapi oleh khalayak, Venus (2012:80). Banyak penelitian menemukan bahwa material pendukung seperti ilustrasi dan kejadian bersejarah dalam sebuah pesan sangat mempengaruhi perubahan sikap orang yang menerima pesan tersebut. Menurut Koballa (1986) sikap yang terbentuk berdasarkan contoh-contoh dan peristiwa bersejarah yang telah terjadi di masa lalu lebih menetap dalam diri seseorang dalam waktu yang lama dibandingkan dengan sikap yang terbentuk berdasarkan data-data (Venus,2012:72). Selain itu menurut Stuyek (1990) dalam Venus (2012:81), penggunaan sesuatu yang jelas dan bahasa yang

sederhana dalam pembuatan pesan akan membuat pesan tersebut lebih mudah dimengerti.

Dalam melaksanakan kampanye pencegahan pernikahan dini, pemerintah kecamatan Saptosari atau yang tergabung dalam panitia kampanye menyiapkan 5 pesan utama yang akan disampaikan atau disosialisasikan. Dalam pesan tersebut berisikan bahwa pernikahan dini dapat mengakibatkan cita-cita orang tua dan anak hilang, memunculkan KK miskin baru, mengakibatkan ibu dan bayi tidak sehat, memunculkan kualitas bayi rendah, serta sebagian besar pernikahan berakhir dengan perceraian. Pesan-pesan tersebutlah yang dikampanyekan oleh para komunikator yang telah ditentukan tim kampanye.

Menurut peneliti, kelima isi pesan tersebut sudah tepat. Hal ini dikarenakan kelima pesan telah mencakup dampak pernikahan dini yang memang timbul di masyarakat dan dapat disaksikan langsung fakta yang terjadi. Menurut Venus (2012:201), pesan kampanye memiliki berbagai dimensi yang meliputi pesan verbal, non verbal, dan visual. Namun apapun dimensinya secara umum konstruksi pesan kampanye harus didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan (*simplicity*), kedekatan (*familiarity*) dengan situasi khalayak, kejelasan (*clarity*), keringkasan (*conciseness*), kebaruan (*novelty*), konsistensi, kesopanan (*courtesy*) dan kesesuaian dengan objek kampanye. Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo beserta tim kampanye yang

terdiri dari Kepala KUA dan Kepala Puskesmas serta dibantu dengan LSM Rifka Annisa, dalam setiap program kampanyenya akan menyampaikan kelima pesan tersebut dengan memberikan contoh nyata di masyarakat, misalnya dengan melihat tetangga mereka yang anaknya melakukan pernikahan dini mengakibatkan tidak melanjutkan pendidikan, KK miskin baru, bahkan sampai bercerai dan anaknya akan dititipkan kepada nenek/kakeknya. Contoh langsung yang diambil di sekitar masyarakat inilah yang menjadikan pesan tersebut dapat bersifat persuasif untuk mengajak masyarakat sadar terhadap dampak negatif pernikahan dini dan mengambil sikap untuk menolak pernikahan dini. Dengan mengambil contoh sekitar masyarakat tentunya dapat lebih efektif dalam mempengaruhi perubahan sikap masyarakat dibandingkan jika hanya menjabarkan sebuah data.

Pesan juga dikemas dengan menarik saat dilakukan deklarasi ke sekolah. Untuk kampanye di sekolah, pesan berfokus pada bahayanya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Anak-anak diberikan penjelasan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan jika menikah dini seperti hilangnya cita-cita, belum siapnya mengurus anak, hingga dapat terjadi perceraian. Anak-anak ditanamkan untuk meraih cita-cita setinggi mungkin dengan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu konstruksi pesan juga dibangun oleh LSM Rifka Annisa melalui kelas-kelas diskusi yang diadakan di dua desa yaitu Jetis dan Kepek. Pesan

yang disampaikan meliputi bahaya pernikahan dini, komunikasi keluarga, bagaimana mengkomunikasikan kesehatan reproduksi kepada anak, hingga mengedukasi tentang gender. Dalam kelas tersebut pesan akan semakin berkembang dengan adanya diskusi, tanya jawab, bahkan permainan, hingga membuat para peserta dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik.

Setelah penyampaian pesan kampanye melalui pengadaan kelas, para peserta diharapkan dapat menyebarkan pesan yang sudah di peroleh ke masyarakat sekitar mereka. Hal ini dilakukan oleh para dukuh yang mengikuti kelas dewasa dengan menyisipkan pesan-pesan tersebut saat adanya pertemuan rutin di lingkungan mereka seperti rapat RT hingga PKK. Pesan juga terkadang disampaikan melalui pertemuan santai para remaja seperti saat berkumpul bersama dan berbincang-bincang mengenai edukasi yang sudah diperoleh tersebut.

5. Taktik

Taktik sangat bergantung pada tujuan dan sasaran yang akan dibidik program kampanye. Semakin kompleks tujuan dan sasaran bidik maka taktik yang digunakan harus semakin kreatif dan variatif. Namun demikian, pemilihan taktik sebenarnya hanya didasarkan pada dua fungsi yaitu fungsi menghubungkan dan fungsi meyakinkan. Pertama, taktik mengidentifikasi

dan menghubungkan program kampanye dengan sasaran melalui media komunikasi tertentu. Selanjutnya, taktik meyakinkan sasaran melalui kekuatan pesan komunikasi hingga membuat sasaran berpikir, percaya dan bertindak sesuai dengan tujuan program kampanye. Supaya taktik yang dipilih dapat menjalankan fungsi menghubungkan dan meyakinkan, maka harus dilihat tingkat ketepatan dan daya penyalaiannya (Venus 2012:153).

Pelaksanaan kampanye pencegahan pernikahan dini dilakukan oleh tim kampanye dengan beberapa taktik. Langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi sebelum deklarasi dilakukan. Sosialisasi dilakukan berbagai tahap dengan disisipkan melalui program-program atau acara yang dimiliki tiap instansi, seperti Puskesmas yang memiliki program Kesra (Kesehatan Remaja), kemudian KUA yang memiliki program pendidikan pranikah, hingga acara-acara yang dimiliki pemerintah kecamatan, desa, hingga padukuan. Sehingga sebelum deklarasi dilakukan, banyak masyarakat yang sudah sadar (*aware*) dengan adanya isu kampanye pencegahan pernikahan dini di Saptosari.

Taktik selanjutnya yang dilakukan adalah Camat Saptosari membentuk kerjasama antara Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan Lurah, untuk tidak membiarkan pernikahan dini terjadi kembali dengan cara tidak akan memberikan surat pengantar kelurahan untuk menikah. Sehingga langkah masyarakat yang ingin menikah dini ke KUA akan gagal jika Lurah

tidak mau memberikan surat pengantar ke KUA. Jika pasangan bersikeras untuk tetap menikah, maka KUA akan melaporkan ke Camat, sehingga pasangan tersebut akan dipanggil ke kantor kecamatan dan diberikan nasihat mengenai pernikahan dini beserta penjelasan hukum yang berlaku mengenai menikah di bawah umur oleh Camat, Kapolsek, dan Kepala Puskesmas. Meskipun taktik demikian telah dilakukan, masih terdapat beberapa masyarakat yang tetap ingin menikah atau menikahkan anaknya yang masih belia dengan beralasan telah hamil, maka tim kampanye masih menjalankan taktik yang lain. Pemeriksaan kehamilan merupakan suatu keharusan sehingga dapat terlihat apakah hanya alasan atau memang terjadi kehamilan. Jika ternyata diketahui tidak hamil, maka Kapolsek akan turun tangan menjelaskan ancaman hukum yang berlaku jika menghamili anak di bawah umur, sehingga mereka tidak jadi melakukan pernikahan dini. Namun jika kehamilan memang sudah terjadi, maka mereka dengan terpaksa diijinkan menikah dengan syarat harus mendapatkan surat putusan dari pengadilan agama. Hal ini dikarenakan anak yang dikandung harus dipertanggungjawabkan.

Kampanye bukanlah tindakan yang bersifat kaku dan parsial, tetapi bersifat adaptif, antisipatif, integratif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Hal ini juga terlihat pada kampanye yang dilakukan pemerintah Kecamatan Saptosari dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang memiliki dampak negatif diantaranya perceraian serta tingginya angka

kematian ibu dan bayi. Selain kedua taktik diatas, berbagai tindakan dilakukan dalam bentuk sosialisasi serta edukasi di berbagai kelompok remaja, perempuan, hingga tokoh agama yang memiliki kelompok pengajian tertentu setelah deklarasi tingkat kecamatan dilakukan. Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut kampanye ke lapisan kedua, yaitu masyarakat.

Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah berupa tindakan yang adaptif. Tindakan kampanye yang bersifat adaptif artinya ia terbuka terhadap masukan-masukan baru atau bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa adalah dengan melihat kondisi lingkungan saat ini. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dengan membuat forum anak dan kelas remaja, kemudian terdapat pula kelas ayah dan kelas ibu. Kelas remaja merupakan edukasi mengenai kegiatan remaja yang positif. Selain itu diberikan pula materi mengenai kesehatan reproduksi, bagaimana bersikap terhadap lawan jenis, serta pandangan mengenai pernikahan. Dengan adanya edukasi untuk mengalihkan kegiatan remaja ke hal yang positif serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai pernikahan, para remaja dapat menentukan sikap untuk menolak pernikahan dini serta ingin melanjutkan cita-cita mereka. Kemudian terdapat pula forum perempuan serta kelas ayah dan kelas ibu. Dalam forum dan kelas tersebut berisikan tentang edukasi mengenai peran dalam keluarga, bagaimana mendidik dan berkomunikasi dengan anak, bagaimana berbagi peran antara

suami dan istri, serta dilarangnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Edukasi ini merupakan hal yang penting ditengah maraknya kasus perceraian serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan hal-hal negatif diantaranya dampak psikologis terhadap anak.

Selain forum dan kelas-kelas tersebut, ada pula program sosialisasi dan edukasi terhadap tokoh agama. Tokoh agama dinilai memiliki peran yang sangat penting dimana mereka memiliki forum pengajian dengan anggota yang banyak. Sosialisasi diberikan agar tokoh agama memiliki perspektif yang sama bahwa pernikahan dini hal yang harus dicegah karena memiliki dampak negatif yang banyak. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya pernikahan siri, dimana mereka yang ingin menikah dini tidak diijinkan oleh KUA sehingga memilih menemui tokoh agama untuk menikah siri. Apalagi mengingat terdapat salah satu tokoh agama yang tidak setuju dengan adanya larangan menikah dini sehingga pihak kecamatan harus bekerjasama dengan pihak pengadilan agama untuk tetap tegas dengan tidak mengijinkan atau memberikan surat dispensasi pernikahan, sehingga pasangan yang ingin menikah di KUA tetap tidak dapat dilaksanakan. Perlunya menyamakan persepsi dengan tokoh agama merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat tepat, mengingat pernikahan siri dapat tetap terlaksana jika tokoh agama tetap mau mendukung ataupun menikahkan anak yang masih dibawah usia pernikahan.

Berdasarkan langkah-langkah atau taktik yang dilakukan oleh tim kampanye, menurut penulis langkah-langkah tersebut sudah tepat, karena taktik yang dilakukan sudah berfungsi untuk menghubungkan dan meyakinkan. Taktik yang menghubungkan yaitu pada tahap sosialisasi yang menjadi penghubung sebelum dilakukannya deklarasi, sehingga masyarakat tidak bingung atau bertanya-tanya mengenai kegiatan yang dilakukan karena sudah adanya sosialisasi. Kemudian dilanjutkan pula adanya sosialisasi dan edukasi dengan membentuk forum dan kelas yang nantinya dapat disebarluaskan kembali ke masyarakat. Selanjutnya terdapat pula taktik yang meyakinkan, yaitu taktik dimana pasangan yang tetap ingin menikah tidak diberikan surat pengantar pernikahan oleh kelurahan, dan jika tetap memaksa maka akan dipanggil, dinasehati, dan diyakinkan oleh Camat, Kapolses, serta Kepala Puskesmas untuk tetap tidak melakukan pernikahan dini tersebut. Selain taktik tersebut, taktik saling kerjasama antara instansi juga sangat baik untuk diterapkan. Kerjasama antara Camat dengan Pengadilan Agama untuk tidak memberikan dispensasi pernikahan juga merupakan langkah yang tepat, sehingga mereka yang memaksa ingin tetap tidak dapat dilakukan.

Untuk taktik sosialisasi dengan membuat kelas remaja, kelas perempuan, serta kelas ayah dan ibu, menurut penulis juga sudah tepat, karena melalui edukasi dalam kelas tersebut dapat lebih menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Namun pelaksanaan sosialisasi dan kelas-kelas ini sebaiknya

tidak hanya dilaksanakan di dua desa saja, tapi dapat dilaksanakan untuk ke seluruh desa, sehingga tidak hanya dua desa saja yang tereduksi dengan baik.

6. *Messenger* atau Pemesan

Venus (2012:54) menerangkan bahwa secara umum siapapun yang terlibat dalam menggagas, merancang, mengorganisasikan dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye dapat disebut sebagai pelaku kampanye. Ini berarti kegiatan kampanye tidak dikerjakan oleh pelaku tunggal melainkan sebuah tim kerja (*teamwork*)

Sebagai sumber informasi, seseorang harus peduli dengan kredibilitas dirinya sendiri, di mana kredibilitas ini berkaitan dengan persepsi khalayak tentang keefektifan seseorang sebagai pembicara. Demikian halnya dengan pelaku kampanye, ia harus memperhitungkan kredibilitas dirinya di mata khalayak bila ingin pesan-pesan yang disampaikan didengarkan (*received*) dan diterima khalayak (*accepted*)

Penelitian yang dilakukan Hovland, Janis dan Kelley (Windahl, Signitzer & Olson, 1983) menemukan tiga aspek yang memengaruhi kredibilitas sumber yakni keterpercayaan (*trustworthiness*), keahlian (*expertise*), dan daya tarik (*attractiveness*), Venus (2012:57-63).

- a) Keterpercayaan (*Trustworthiness*)

Berkaitan dengan penilaian khalayak bahwa sumber informasi dianggap tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, memiliki integritas pribadi, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

b) Keahlian (*Expertise*)

Faktor keahlian berhubungan dengan penilaian dimana sumber dianggap berpengetahuan cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan tertentu dan menguasai skill yang bisa diandalkan.

c) Daya Tarik (*Attractiveness*)

Secara umum konsep ini meliputi penampilan fisik dan identifikasi psikologis sebagai daya tarik pada seseorang yang didasarkan pada kesamaan nilai atau karakteristik kepribadian lainnya.

Pesan yang disampaikan saat kampanye, tentunya merupakan komunikasi persuasif atau komunikasi yang bersifat ajakan dan bertujuan realistis, dapat berupa tahap membentuk kesadaran (*awareness*), sikap (*attitude*), hingga perilaku (*behavior*). Untuk melakukan komunikasi persuasif pada kampanye, selain menentukan pesan yang akan disampaikan dan sasaran (khalayak), terdapat satu hal lagi yang menentukan komunikasi persuasif yaitu sumber (komunikator). Suciati (2015:246) juga memaparkan bahwa seorang komunikator dalam hal ini harus kredibel. Ia harus memiliki syarat keterpercayaan (*truthworthiness*) dari penerima pesan, kepakaran

(*expertness*), disukai oleh penerima pesan, memiliki kesamaan dengan penerima pesan, serta memiliki beraneka sumber (*multiple sources*) dalam memperjelas isi pesan yang ingin disampaikan. Sumber pesan dapat berasal dari : seseorang, kelompok, atau institusi. Semakin percaya kita dengan orang yang mengirimkan pesan, maka kita akan semakin menyukai untuk dipengaruhi oleh pemberi pesan. Dua aspek penting dalam kredibilitas, yaitu keahlian dan kepercayaan. Kedua hal ini saling berkaitan terhadap daya persuasif. Jika kredibilitas tinggi, maka daya persuasif tinggi, demikian juga sebaliknya kredibilitas rendah menyebabkan daya persuasif rendah.

Hal ini pula yang dilakukan oleh tim kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam menyampaikan pesan persuasif kampanye. Tim kampanye memilih Camat, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Kapolsek, serta LSM Rifka Annisa yang memang memiliki kredibilitas di bidangnya masing-masing. Camat akan menyampaikan pesan kampanye dari segi sosial budaya dan aspek ekonomi di Saptosari, kemudian Kepala KUA akan menjelaskan mengenai pernikahan yang baik, kepala Puskesmas menjelaskan soal kesehatan reproduksi serta kehamilan yang baik, Kapolsek menjelaskan dari segi hukum hamil dibawah umur serta ancaman pidana, dan LSM Rifka Annisa yang membuat program sosialisasi yang tepat pada masyarakat dan menjelaskan perihal kekerasan dalam rumah tangga serta komunikasi yang baik dalam keluarga.

Penyampaian pesan sesuai keahlian masing-masing tersebut tentunya dapat membuat masyarakat percaya karena para komunikator menguasai pesan kampanye yang memang merupakan pekerjaan mereka sehari-hari dan masyarakat memang mengetahui atau mengenal mereka.

Tidak hanya pesan dan komunikator yang dapat menghasilkan pesan persuasif yang efektif, Wilbur Schramm dalam karyanya "*Communication Research in the United States*" menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil, apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan *frame of reference*- yakni paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experiences and meanings*)- yang pernah diperoleh komunikator. *Frame of Reference* atau "kerangka acuan" ini meliputi nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya yang pernah dialami seseorang. Menurut Schramm, bidang pengalaman (*field of experience*) merupakan faktor yang penting dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya bilamana tidak sama, akan terdapat kesulitan untuk mengerti satu sama lain (Effendy, 1993:77). Hal ini pula yang diterapkan dalam penyampaian pesan kampanye. Salah satu contohnya adalah Camat yang akan memberikan contoh kepada masyarakat mengenai orang-orang di sekitar mereka yang sebelumnya melakukan pernikahan dini, tidak dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dikarenakan pendidikan yang masih rendah.

Kemudian jika terjadi perceraian, maka sang anak akan dititipkan kepada orang tua (kakek/nenek) dimana justru bukan mengurangi beban ekonomi, malah menambah beban ekonomi keluarga. Anak yang dibesarkan dalam situasi kegagalan rumah tangga (*broken home*) dapat beresiko memiliki perilaku kenakalan remaja pula. Dengan menjelaskan melalui contoh kasus yang nyata dan diketahui pula oleh masyarakat, maka penyampaian pesan pun dapat lebih efektif.

Selain mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui para komunikator tersebut, tim kampanye juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang nantinya juga akan menjadi komunikator selanjutnya untuk memperluas atau menyebarkan pesan kampanye. Komunikator yang memiliki kredibilitas dan dapat mempersuasikan masyarakat, dapat dikategorikan pula sebagai *opinion leader*. Menurut Nurudin (2007:160-161) *opinion leader* adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Sudah sepantasnya jika mereka mempunyai karakteristik yang membedakan dirinya dengan yang lain. Beberapa karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota masyarakat lain
- Lebih tinggi Status Sosial Ekonominya (SSE)

- Lebih inovatif dalam menerima dan megadopsi ide baru
- Lebih tinggi pengenalan medianya (media exposure)
- Kemampuan empatinya lebih besar
- Partisipasi sosial lebih besar
- Lebih kosmopolit (mempunyai wawasan dan pengetahuan luas)

Sosialisasi dan edukasi kepada *opinion leader* dilakukan karena mereka merupakan orang-orang yang paling dekat dengan masyarakat dalam kesehariannya serta menjadi panutan. Mereka yang diedukasi diantaranya adalah Kepala Desa, Pak Dukuh dan Bu Dukuh, Para Remaja, hingga Tokoh Agama. Sosialisasi dan edukasi dibimbing oleh LSM Rifka Annisa dalam suatu kelas dengan agenda pertemuan rutin tiap bulannya. Mereka diberikan materi-materi maupun diskusi sesuai dengan ruang lingkupnya, seperti kelas ayah mengedukasikan tentang peran laki-laki dalam rumah tangga, perlunya kerjasama dan komunikasi yang baik, peran gender, hukuman melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga komunikasi dengan anak. Untuk kelas remaja sendiri akan diedukasi mengenai bagaimana berperilaku atau bergaul semestinya dengan lawan jenis, kesehatan reproduksi, hingga bagaimana mengisi waktu dengan kegiatan positif. Untuk tokoh agama, sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi bahwa pernikahan dini bukanlah solusi yang tepat karena justru memiliki banyak dampak negatif dibandingkan positifnya, sehingga tokoh agama juga diharapkan dapat mendukung untuk

menolak pernikahan dini. Misalnya saja kasus pernikahan siri yang pada akhirnya merugikan pihak perempuan karena suami tidak sepenuhnya dapat bertanggung jawab dalam rumah tangga, hingga timbulnya perceraian.

Langkah tim kampanye dalam menentukan komunikator (*messenger*) untuk menyebarkan pesan kampanye ini menurut penulis merupakan langkah yang sudah tepat. Mengingat pesan persuasif dapat diterima oleh sasaran atau masyarakat jika komunikator memiliki kredibilitas, telah dipenuhi oleh mereka yang dipilih sebagai komunikator (*messenger*). Kemudian dilanjutkan dengan mengedukasi *opinion leader* yang ada di masyarakat juga merupakan langkah yang tepat, karena pesan kampanye yang hanya disampaikan di acara atau situasi tertentu akan sulit menyebar di masyarakat, namun dengan memilih *opinion leader* maka pesan kampanye dapat menyebar lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pola penyebaran pesan kampanye seperti ini dapat lebih efektif serta menghemat pengeluaran dana program kampanye.

7. Sumber daya

Selain menentukan tujuan, pesan, komunikator, dan taktik, sumber daya juga sangat menentukan jalannya program kampanye. Menurut Ruslan (2013:104) dalam Humairoh (2016:13) terdapat tiga jenis sumber daya utama yang harus diperhatikan. Jenis sumber daya yang pertama adalah sumber daya

manusia sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sebuah kegiatan, meliputi tenaga profesional, tenaga ahli, hingga staf pendukung dan petugas di lapangan. Kedua, sumber biaya operasional sebagai penunjang selama kegiatan berlangsung yang harus dikelola secara efisien. Ketiga, sumber perlengkapan yang berupa dukungan peralatan teknis, pemanfaatan media komunikasi dan tim kerja lain.

Dalam melaksanakan program kampanye ini, tim kampanye dibentuk oleh Camat Saptosari dengan melibatkan mereka memang terlibat saat mendiskusikan masalah pernikahan dini. Panitia kampanye sendiri terdiri dari Camat Saptosari, Kepala KUA, Sie.Kesejahteraan Sosial (dari kantor kecamatan), anggota (polsek, puskesmas), serta LSM Rifka Annisa. Pententuan panitia ini merupakan komitmen bersama dan secara sukarela dalam melaksanakan kampanye guna mengatasi masalah pernikahan dini di Saptosari.

Menurut Venus (2012:157) sumber daya manusia yang digunakan jasanya untuk mendukung program kampanye harus dihitung kemampuan dan usahanya. Besarnya kemampuan dan usaha yang dikeluarkan SDM akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kampanye. Selain itu kemampuan dan usaha tersebut mempengaruhi jumlah imbalan jasa yang harus dikeluarkan. Namun dalam kampanye ini, pemerintah Saptosari tidak memiliki dana khusus untuk melaksanakan kampanye. Dana terbatas yang diperoleh hanyalah sumbangan dari pengajian rutin bulanan serta bantuan dari LSM

Rifka Annisa. Pihak panitia maupun pelaksana kampanye (komunikator), tidak menerima imbalan dalam melakukan program kampanye ini, semuanya merupakan komitmen bersama dan bersifat sukarela.

Menurut penulis cara pemerintah kecamatan Saptosari dalam menentukan sumber daya yang dibutuhkan sudah tepat dan efisien. Melihat kekurangan dana yang ada, tidak menjadikan halangan dalam melaksanakan kampanye. Meskipun menurut Camat Saptosari dan Kepala Puskesmas, dana juga berpengaruh. Keterbatasan dana membuat panitia tidak dapat melakukan kegiatan yang besar, sehingga kampanye dilakukan dengan memanfaatkan program yang sudah ada atau menyisipkan kampanye pada acara-acara tertentu. Selain itu bantuan dari Rifka Annisa juga menjadikan kampanye lebih maksimal meskipun memiliki keterbatasan dana atau sumber daya.

8. Saluran Kampanye

Tahapan selanjutnya yang juga penting dalam melaksanakan kampanye adalah pemilihan saluran kampanye. Saluran kampanye merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye. Dalam tahap ini, tim kampanye kecamatan Saptosari tidak menggunakan sarana atau media seperti program kampanye pada umumnya seperti televisi, koran, dan sebagainya, namun kampanye ini dilakukan dengan komunikasi tatap muka dengan *messenger* tertentu untuk menyampaikan pesan kampanye ke masyarakat.

Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Menurut Setyodarmodjo (2003:82-83), Komunikasi dapat dibedakan antara :

- Komunikasi tatap-muka (*face-to-face communication*). Komunikasi ini dapat berjalan antara seorang dengan seorang yang lain, dapat pula antara seorang dengan kelompok masyarakat, atau antara 2 kelompok.
- Komunikasi melalui sarana atau media (*mass media communication*, yang kadang disingkat pula dengan *mass communication*), yaitu komunikasi dengan mempergunakan sarana seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

Selain itu, ada 2 sifat komunikasi dalam manajemen, yaitu :

- Komunikasi satu arah (*one-way communication*), umpamanya : perintah, nota, directives, pengarahan, indoktrinasi, propaganda, publisitas, (surat-edaran, bulletin, majalah berkala) dan lain-lain.
- Komunikasi dua arah (*two-waytraffic communication*), seperti : rapat dinas, musyawarah, diskusi, persuasi, konsultasi, dan lain-lain.

Menurut Setyodarmojo (2003:84) dalam *mass-media communication* atau komunikasi secara sekunder itu kebanyakan akan mendapat gangguan (*noise*), sehingga “*commonness*”, yaitu hasil dari komunikasi itu lebih lambat dibandingkan dengan “*face-to-face communication*” atau komunikasi secara

primer. Oleh karena itu komunikasi yang efektif dalam *Public Relations* adalah komunikasi dua arah dengan tatap-muka secara langsung, terutama sekali oleh karena tujuan *Public Relations* itu bersangkutan-paut dengan sikap (*attitude*) manusia yang memerlukan penanganan dengan teknik, cara dan seni (*art*) yang sesuai dengan kondisi yang ada, serta reaksi, respon atau umpan balik (*feedback*) seketika itu.

Proses kampanye dengan menggunakan saluran komunikasi tatap muka, menurut penulis merupakan langkah yang tepat. Selain dapat berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, proses komunikasi dapat berjalan dua arah sehingga dapat terjadi proses diskusi. Dengan adanya diskusi, masyarakat dapat lebih paham akan isi pesan kampanye. Selain itu proses penyampaian komunikasi secara langsung dapat menghemat dana atau pengeluaran kampanye, dimana kampanye ini juga memiliki keterbatasan dana yang harus diperhatikan.

9. Evaluasi

Anne Gregory (2004:139) dalam Humairoh (2016:13) menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk memantau atau menguji serta merupakan analisis terhadap hasil akhir dari suatu kampanye atau program. Sedangkan review adalah langkah untuk mengidentifikasi segala perubahan strategik yang perlu dilakukan.

Pemantauan (monitoring) pelaksanaan kampanye pada prinsipnya sama dengan evaluasi proses yaitu suatu evaluasi yang dilaksanakan ketika kampanye berlangsung. Metode yang digunakan untuk kegiatan pemantauan ini diantaranya meliputi penggunaan dan updating buku harian kampanye, melaksanakan pertemuan-pertemuan staff untuk memperoleh umpan balik, pengamatan operasional kampanye, membuat progress report, melakukan sesi wawancara untuk mengumpulkan detail informasi yang seringkali tidak terungkap dalam rapat atau pertemuan staff kampanye.

Terkait dengan pertanyaan apa dan pada tingkatan apa evaluasi harus dilakukan, Ostergaard (2002) dalam Venus (2012:212-213) mengatakan hal itu bergantung pada tujuan evaluasi itu sendiri. Secara umum, evaluasi kampanye dapat dikategorisasikan dalam empat level atau tingkatan sebagai berikut : tingkatan kampanye (*campaign level*), tingkatan sikap (*attitude level*), tingkatan perilaku (*behavior level*), dan tingkatan masalah (*problem level*). Dikarenakan tujuan dari kampanye ini adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini, maka evaluasi yang sesuai adalah tingkatan perilaku.

Para ahli memandang tingkatan perilaku sebagai level yang paling penting dalam kebanyakan evaluasi kampanye. Sayangnya jenis evaluasi ini sering diabaikan atau dilakukan sekadarnya dengan mengamati realitas permukaan (*superficial reality*) pada realitas permukaan dimana orang seringkali tampak berubah perilakunya, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Untuk

memastikan kita memperoleh data yang akurat tentang perubahan perilaku ini, para ahli kampanye menyarankan kita melihat langsung perilaku tersebut secara apa adanya dalam situasi yang normal.

Pada tahapan evaluasi ini, tim kampanye juga melakukan evaluasi secara bertahap atau monitoring program kampanye dengan melihat data yang ada pernikahan di KUA serta data kesehatan ibu dan bayi Puskesmas. Hal tersebut dirasa paling mudah dan efektif karena panitia kampanye sendiri berada pada lingkup pekerjaan tersebut sehingga lebih mudah memantau. Evaluasi perubahan perilaku sendiri bukanlah evaluasi yang dapat diukur, namun lebih melihat kepada masyarakat secara langsung. Untuk melihat perubahan perilaku masyarakat tentu pemerintah tidak dapat melakukannya secara langsung, namun lebih mengarah kepada sistem koordinasi melalui Dukuh, Kepala Desa, hingga ke Camat. Menurut penulis langkah tersebut cukup efektif mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kecamatan Saptosari. Namun menurut Camat ada hal yang masih harus terus dipantau hingga saat ini yaitu kenakalan remaja. Keterbukaan akses informasi menjadikan remaja berada pada keadaan untuk sulit dikontrol, sehingga pada tahun 2017 tercatat ada 2 anak lagi yang mendaftar pernikahan dan masih dibawah umur karena telah hamil. Dikarenakan pasangan mereka berasal dari daerah lain, maka Camat Saptosari meminta mereka untuk menikah di daerah tersebut. Untuk itu Camat Saptosari memiliki rencana kedepannya akan dibentuk Satgas Anti Pegaulan Bebas. Mereka nantinya terdiri dari polisi,

tentara, linmas, dan korkam yang akan berpatroli atau oprasi di wilayah yang banyak berkumpulnya anak-anak lawan jenis, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Namun rencana tersebut masih dalam tahap didiskusikan dengan pihak-pihak terkait.